

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM BIDANG
PEMBANGUNAN FISIK DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN
SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Muhammad Nuzul Amri
NPM : 137110253**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Muhammad Nuzul Amri
NPM : 137110253
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 26 November 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Zulkifli., M.Si

Eka Komalasari, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Hendry Andry, S.Sos, M.Si.
PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta

tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku

dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga allah membahas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.” dengan tepat waktu. Penelitian ini penulis ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak kekurangan dalam penulisan dan pengetikan serta kekurangan dari segi isi maupun kata-katanya. Demi tercapainya kesempurnaan Skripsi ini kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan dari pembaca untuk tercapainya kesempurnaan. Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkepeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogya,M.Si. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry S.Sos, M.Si. Selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Publik, yang telah membantu dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si. Sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Eka Komalasari S.Sos., M.Si yang juga bertindak sebagai pembimbing ke II penulis, dimana selama ini dengan sabar memberikan dukungan dan ilmunya dalam penyelesaian Skripsi yang sedang penulis kerjakan saat ini.
6. Kepada kedua orang tua saya yang tetap setia dan selalu memberikan doa dan juga dukungan yang tak henti-hentinya kepada saya didalam proses penyelesaian Skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman yang ada di prodi Administrasi Publik yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan juga membantu dalam segi moril ataupun materil khususnya Erig Rinanda, S.AP., Misbahul Munir, Windi Pebriyani, S.AP, Darwati, S.AP. Azhar, S.AP, Tatik Ernawati, Attari Danil Chaniago dan mahasiswa Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Administasi Publik Kelas A angkatan 2013 Universitas Islam Riau.

8. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Pegawai Suka Damai Kecamatan Singig Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan peneltian di kantor Desa tersebut tersebut. Semoga penelitian nantinya dapat bermanfaat untuk mendorong perkembangan desa yang penulis maksud di atas.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Esa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin ya robbal alamin.

Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 26 November 2019
Penulis,
Ttd

Muhammad Nuzul Amri
NIM. 137110253

PERSETUJUAN	TIM
PEMBIMBING	
.....	
ii	
PERSEMBAHAN	
.....	
vi	
KATA	
PENGANTAR	
.....	
vii	
DAFTAR	
ISI	
.....	
ix	
DAFTAR	
TABEL	
.....	
xiii	
DAFTAR	
LAMPIRAN	
.....	
xvi	
DAFTAR	
GAMBAR	
.....	
xvii	
PERNYATAAN	KEASLIAN
NASKAH	
.....	
xviii	
ABSTRAK	
.....	
xix	
ABSTRACT	
.....	
xx	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar	
Belakang	

.....
.....

1

B. Rumusan
Masalah

.....
.....

18

C. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian

.....
.....

18

1. Tujuan
Penelitian

.....
.....

18

2. Manfaat
Penelitian

.....
.....

18

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi

Kepustakaan

20

1. Konsep

Administrasi

20

2. Konsep

Organisasi

23

3. Konsep

Manajemen

.....
26

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

.....
28

5. Konsep Pelayanan Publik

.....
30

6. Konsep Kebijakan Publik

.....
39

7. Konsep Evaluasi

.....
40

8. Konsep Pelaksanaan Tugas

.....
45

9. Konsep Pembangunan Desa

.....
47

B. Kerangka Pikir

.....
53

C. Hipotesis

.....
54

D. Konsep Operasional

.....
54

E. Operasional
Variabel

.....
.....
58

F. Teknik
Pengukuran

.....
.....
59

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe
Penelitian

.....
.....
63

B. Lokasi
Penelitian

.....
.....
64

C. Populasi dan
Sampel

.....
.....
64

D. Teknik Penarikan
Sampel.....

.....
.....
66

E. Jenis dan Sumber
Data

.....
.....
66

F. Teknik Pengumpulan
Data

.....
.....
67

G. Teknik Data	Analisis
68	

H. Jadwal Penelitian	Kegiatan
70	

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pekanbaru	Ringkas	Kota
71		

B. Sejarah Singingi	Kabupaten	Kuantan
73		

C. Kondisi Singingi	Sosial	Budaya	Masyarakat	Kab.Kuantan
75				

D. Struktur Damai	Organisasi	Kantor	Desa	Suka
76				

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	
77	

1. Identitas Kelamin	Responden	Berdasarkan	Jenis
77			

2.	Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia.....	78
3.	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	79
B.	Hasil dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	
	
	
80		
1.	
	Efektivitas.....	
	
81		
2.	
	Efisiensi.....	
	
89		
3.	Kecukupan.....	
	
96		
4.	
	Pemerataan	
	
103		
5.	
	Responsivitas.....	
	
110		
6.	
	Ketepatan.....	
	
116		

C. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dengan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
123.....

D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
124.....

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....
126

B. Saran.....
127

DAFTAR

PUSTAKA.....
130

LAMPIRAN.....
132

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Program Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018	11
I.2 : Rekapitulasi jumlah penduduk Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Sampai Bulan Juli Tahun 2017	16

II.1	: Operasionalisasi Variable Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	58
III.1	: Jumlah Populasi Penelitian Tentang Evaluasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa Suka Damai	63
III.2	: Jumlah Sampel Penelitian tentang Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Suka Damai	63
III.3	: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	70
V.1	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat	78
V.2	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat	79
V.3	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat	80
V.4	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Sumber Daya Manusia Pelaksana Tugas Program Mencukupi)	81
V.5	: Daftar Perangkat Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir	82
V.6	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Ketersediaan Anggaran dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana)	84
V.7	: Jumlah Anggaran Pembangunan Desa Tahun 2018	86
V.8	: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Efektivitas)	86

V.9	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai dengan Waktu yang Telah Ditentukan)	90
V.10	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Penyediaan Bahan-Bahan Material sesuai dengan Bangunan yang Akan Dilaksanakan)	92
V.11	: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Efisiensi)	93
V.12	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Program yang Disusun Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat)	96
V.13	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Perencanaan Anggaran yang Sesuai dengan Kebutuhan Program)	98
V.14	: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Kecukupan)	101
V.15	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Pembangunan yang Adil dan Merata Di Setiap Daerah dalam Desa)	104

- V.16 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Jumlah Anggaran Tidak Berbeda dengan Pembangunan yang Sama) 105
- V.17 : Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 107
- V.18 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Melibatkan Masyarakat dalam Proses Pengawasan Terhadap Pembangunan) 110
- V.19 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Menerima Saran, Kritik dan Masukan dari Masyarakat Desa) 112
- V.20 : Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Responsivitas) 114
- V.21 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Pembangunan Fisik Telah Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat) 117
- V.22 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Ketepatan dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan) 118
- V.23 : Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Ketepatan) 120

- V.24 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap 123
Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang
Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi
Hilir Kabupaten Kuantan Singingi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Kuisisioner Untuk Masyarakat dengan judul Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang	132

Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi

- 2 : Daftar Wawancara Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 148
- 3 : Rekap Telly Penelitian untuk Masyarakat tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 159
- 4 : Dokumentasi Penelitian Dilapangan Terkait Dengan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 177
- 5 : Rekomendasi Surat Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Terkait Dengan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi 182
- 6 : Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Terkait Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi 183
- 7 : Dokumentasi Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi terkait Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir. 184
- 8 : Surat Keterangan Balasan dari Pemerintan Desa Suka Damai terkait Penelitian Tentang judul Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 185

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	: Kerangka Pikir penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	53
IV.1	: Struktur Organisasi Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.	76
V.1	: Pembangunan Semenisasi Jalan Pada Desa Suka Damai	91
V.2	: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pembangunan yang Dilakukan Pihak Desa Suka Damai	99
V.3	: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pembangunan yang Dilakukan Pihak Desa Suka Damai	100
V.4	: Dokumentasi Papan Izin Pembangunan	100
V.5	: Dokumentasi Proses Pembangunan Drainase yang Tidak Ada Papan Informasi Anggaran	107
V.6	: Dokumentasi Kotak Saran yang Tersedia Di Kantor Desa Suka Damai	113

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nuzul Amri
NPM : 137110253
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 November 2019
Pelaku Pernyataan,

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM BIDANG
PEMBANGUNAN FISIK DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN
SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

Oleh
Muhammad Nuzul Amri

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa, Pembangunan Fisik

Penelitian ini bertujuan untuk Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, serta Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Di Bidang Pem kretaris Desa Suka Damai, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Damai, Masyarakat Suka Damai. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah tehnik sensus untuk Kepala Pegawai Pemerintahan Desa Suka Damai dan teknik Accidental Sampling untuk masyarakat, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi “Cukup Optimal”.

*Evaluation Of Village Head Duty Implementation In Physical Development In
Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kuantan Singingi District*

Abstract

By

Muhammad Nuzul Amri

Keywords: *Evaluation, Implementation of Tasks of Village Heads, Physical Development*

This study aims at the Implementation of the Village Head's Duties in the Field of Physical Development in Suka Damai Village, Singingi Hilir Subdistrict, Kuantan Singingi District, and to find out the obstacles faced by the Village Head in the Implementation of Tasks in Physical Development in Suka Damai Village, Singingi Hilir District Kuantan Singingi. The indicators of this study are Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy. This type of research located in Kuantan Singingi Regency is a descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a tool for collecting data and data collected with this tool and then becomes the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives in the studied location. The population used in this study is Suka Damai Village Chief, Secretary of Suka Damai Village, Village Consultative Body (BPD) Suka Damai, Suka Damai Community. The sampling technique used in determining individual samples is a census technique for Suka Damai Village Government Chiefs and Accidental Sampling techniques for the community, the types and data collection techniques used in this study consist of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is by using a frequency table tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the Evaluation of the Implementation of the Task of the Village Chief in the Field of Physical Development in Suka Damai Village, Singingi Hilir Subdistrict, Kuantan Singingi District was "quite optimal".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan warga negara Republik Indonesia dan sekaligus tujuan dari Negara Republik Indonesia dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dengan kata lain salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut negara membutuhkan wewenang untuk menentukan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Dengan adanya wewenang saja ternyata tidak cukup melainkan harus ada administrasi yang baik.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau undang-undang dasar yang menjamin sertiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur dalam permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Yang mana tercermin didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV, yang menyebutkan: “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Didalam Negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden dan dibantu oleh menteri-menteri untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan, masing-masing menteri-menterinya yang dipilih langsung oleh presiden dan serta mempunyai tugas pokok intinya, menteri-menteri berhak menjalankan tugas masing-masing berdasarkan bidang yang telah ditetapkan oleh presiden. Menteri-menteri yang telah mendapat mandat tugasnya masing-masing

harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah-pemerintah daerah untuk kelancaran menjalankan tugas sebagai kaki tangan seorang presiden.

Negara dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana telah diatur dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18 ayat 1 s/d 6 yang mana sebagai wujud dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Bahwa Negara Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Negara sebagai sebuah organisasi publik harus mengutamakan segala kebijakan diatas kepentingan publik, baik kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun tidak. Negara Indonesia sebagai sebuah organisasi yang luas yaitu terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri lebih dari 17.000 pulau tidak akan bisa di atur sendiri oleh Pemerintah pusat.

Hal tersebut selanjutnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Salah satu substansi dari kandungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah memberikan otonomi Daerah kepada daerah otonom. Dijelaskan didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya konsep Otonomi Daerah pemerintah daerah berhak menyelenggarakan system pemerintahan daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah terdiri dari Provinsi dan Kabupaten/kota, dimana Pemerintah Desa ditempatkan pada pemerintahan yang terendah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai system pemerintahan mulai dari yang pusat, daerah dan desa, maka desa merupakan mata rantai terendah. Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk menjamin, mekanisme demokrasi ditingkat daerah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini. Untuk mencapai tujuan dimaksud Undang-undang No. 32 tahun 2004 menekankan tiga faktor yang mendasar dan faktor tersebut adalah (1) Memberdayakan Masyarakat, (2) Menumbuhkan Prakarsa dan Kreativitas, (3) Meningkatkan Peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan peran dan fungsi badan perwakilan rakyat.

Prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan

daerahnya masing-masing. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam pemberian pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di katakana bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pembahasan mengenai pemerintahan Daerah tidak lepas dari ruang lingkup Dekonsentrasi, dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Dekonsentrasi adalah Pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi Vertikal di Wilayah tertentu dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Dan instansi Vertikal dapat di artikan sebagai perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan

Pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari yang namanya organisasi, organisasi merupakan suatu wadah bagi pemerintah untuk melaksanakan seluruh aktivitas kerjasama yang memanfaatkan sumberdaya yang telah ada dengan menggunakan metode-metode tertentu dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Organisasi adalah sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang disebut bawahan menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2005; 127).

Dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam sebuah organisasi di butuhkan pula adanya administrasi yang baik guna untuk terciptanya good governance. Dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam sebuah organisasi di butuhkan pula adanya administrasi yang baik guna untuk terciptanya good governance. Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial, administrasi juga sebagai salah satu fenomena atau ciri masyarakat modern, secara eksplisit tergambar administrasi yaitu suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Untuk menjalankan roda organisasi tentunya di butuhkan strategi yang membuat roda organisasi tersebut berjalan dengan sehat dan mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya, dan dengan demikian maka sebuah organisasi membutuhkan sebuah Manajemen sebagai penggerak dan pengatur di dalam organisasi tersebut, fungsi manajemen dalam organisasi tentunya untuk membagi-

bagi peran individu atau sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut, peran inilah yang menjadi penentu apakah tujuan organisasi dapat di capai dengan maksimal atau tidaknya.

Dalam pendapat Hasibuan (2002;2) menjelaskan bahwa manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Pentingnya manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.

Hubungan antara Manajemen dengan sebuah Organisasi adalah sebuah proses, dimana manajemen adalah sebuah proses kegiatan mencapai tujuan melalui kerja sama antara manusia, rumusan tersebut mengandung adanya timbale balik antara kegiatan dan kerja sama disatu pihak dengan tujuan di pihak lain, dalam pencapaian sebuah organisasi dibutuhkan sebuah manajemen yang baik begitupun sebaliknya untuk mendapatkan sebuah manajemen yang baik maka diperlukan sebuah organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang terampil, kreatif serta mampu bekerja secara tim untuk mewujudkan cita-cita yang ingin di wujudkan oleh organisasi tersebut.

Adapun kaitan antara pembahasan yang sedang penulis teliti dengan penjelasan teori di atas adalah berdasarkan situasinya dilapangan, pelaksanaan tugas kepada desa adalah bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang di

dalamnya di susun dalam sebuah organisasi dan di gerakkan dengan menggunakan teori-teori manajemen.

Desa yang mempunyai hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkan pengatur Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menjelaskan bahwa “*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa*”. Mengacu pada peraturan tersebut maka pemerintahan desa sebagai pemerintahan formal dari kesatuan masyarakat desa dan sebagai badan kekuatan terendah maka kepala desa sebagai pemegang kekuasaan atau wewenang untuk mengatur pemerintahan desa maka tugas-tugas tersebut haruslah mampu dijalankan oleh kepala desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas, maka seorang kepala desa memiliki kewenangan yang juga telah di atur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adapun kewenangan tersebut adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang kepala desa tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa yaitu untuk melaksanakan perumusan kebijakan, menumbuhkan prakarsa, pengawasan terhadap keputusan-keputusan serta bertanggung jawab terhadap jalannya pembangunan desa.

Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu bentuk pemerintahan desa yang berupaya mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa menuju tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang mandiri dilihat masih belum sesuai dari apa yang diharapkan dan masih belum terlihat dari perkembangan-perkembangan untuk menuju kearah kemajuan yang lebih baik.

Dan untuk merealisasikan apa yang sudah diatur tentang pemerintahan daerah secara legal dalam undang-undang, sebaiknya sumber daya manusia Indonesia tidak bergerak sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja sama seluruh individu agar bergerak sebagai sebuah tim solid yang akan *me-manage* berbagai persoalan yang ada di setiap daerah itu. Untuk itu, dibutuhkan struktur organisasi yang saling besatu dan bekerjasama.

Kepala desa yang merupakan pemimpin tertinggi haruslah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa. Untuk itu, tugas dan fungsi kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singing Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dimana pada Pasal (9) ayat (1) disebutkan bahwa tugas dan fungsi kepala adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah. Yang dimaksud dengan Urusan pemerintah desa yang diselenggarakan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerjasama antar desa.
2. Menyelenggarakan urusan pembangunan. Yang dimaksud dengan Urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, dan pasar desa.
3. Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan Urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.
4. Dimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;

- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa ;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- d. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa ;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan;
- i. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 9 yang telah penulis sebutkan di atas, maka kepala desa memiliki fungsi yang juga telah di atur dalam Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 yang terdapat pada pasal 11, dimana isinya adalah sebagai berikut:

- a. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa;
- b. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- d. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun focus penulis dalam melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” untuk melakukan penelitian di bidang pembangunan fisik di desa Suka Damai, dan untuk memulai pelaksanaan penelitian pada desa tersebut, penulis tentunya akan menyajikan data-data terkait dengan pelaksanaan program pembangunan yang di rencanakan oleh pemerintah Desa Suka Damai, dan adapun program dan anggaran yang telah di susun oleh pemerintah Desa Suka Damai dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1 : Program Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2018

No	Jenis Program Pembangunan	Tahun & Sumber Dana	Dimensi Bangunan	Total Biaya Pembangunan	Status Pembangunan
1	Pembangunan Gedung PDTA/TPA Desa Suka Damai	2017 Dana Desa	7 m' x 10 m'	Rp 329.086.100	Tidak Selesai
2	Pembangunan Gedung PKBM Desa Suka Damai	2017 Dana Desa	7 m' x 10 m'	Rp 155.194.500	Tidak Selesai
3	Pembangunan Pagar Kantor BumDes	2017 Dana Desa	100 m' x 1.60 m' 4 m' x 8 m'	Rp 178.044.500	Tidak Terlaksana
4	Pembangunan Jalan Pemukiman Desa. (Semenisasi Jalan Desa)	2017 Dana Desa	177 m' x 3 m' x 1.15 m'	Rp 98.201.900	Selesai
5	Pengaspalan Jl.Ali Mansur. (Dusun I)	2017 APBDes / APBD	1230 Meter	Rp 1.23 M	Tidak Selesai
6	Semenisasi Jl.Abdul Wahid. (Dusun II)	2017 APBDes / APBD	516 Meter	Rp 154.800.000	Terlaksana
7	Semenisasi/Rabat Beton Jl.Guru, Dusun III	2017 APBDes / APBD	300 Meter	Rp 100.000.000	Terlaksana
8	Pengaspalan Jl.Rimbo Cangkok (Lanjutan). Dusun IV	2017 APBDes / APBD	500 Meter	Rp 500.000.000	Tidak Terlaksana
9	Pengerasan Jl.PPIP Dusun II	2017 APBDes / APBD	700 Meter	Rp 200.000.000	Tidak Terlaksana
10	Semenisasi Jl. Akasia Dusun III	2017 APBDes / APBD	200 Meter	Rp 70.000.000	Terlaksana
11	Semenisasi Jl.Gaharu Dusun IV	2017 APBDes / APBD	900 Meter	Rp 300.000.000	Tidak Selesai Keseluruhan
12	Pengerasan Sambungan Jl.Ali Mansur Ke Jl.Rimbo Cangkok. Dusun I	2017 APBDes / APBD	900 Meter	Rp 45.000.000	Tidak Terlaksana
13	Semenisasi Jl.Veteran Dusun III	2017 APBDes / APBD	600 Meter	Rp 200.000.000	Terlaksana
14	Pengadaan Tiang Listrik + Jaringan Listrik	2017 Kerja Sama Dengan PT. PLN	62 Batang	Rp 93.000.000	Terlaksana
15	Pengaspalan Jl.Perwira Dusun I	2017 APBDes / APBD	1500 Meter	Rp 1.5 M	Tidak Terlaksana

Sumber : Data olahan penulis bersumber dari Desa Suka Damai tahun 2019

No	Jenis Program Pembangunan	Tahun & Sumber Dana	Dimensi Bangunan	Total Biaya Pembangunan	Status Pembangunan
16	Pembangunan Rumah Layak Huni. (Dusun II)	2017 APBDes / APBD	16 Unit	Rp 800.000.000	Tidak Selesai Keseluruhan
17	Semenisasi JL.Lele (Dusun IV)	2017 APBDes / APBD	250 Meter	Rp 75.000.000	Terlaksana
18	Pembangunan Drainase JL.Mansur Dan Lingkungan Masjid Raya	2017 APBDes / APBD	800 Meter	Rp 280.000.000	Tidak Selesai Keseluruhan
19	Paving Block Masjid Nurul Rahmad. Dusun II	2017 APBDes / APBD	600 M ³	Rp 45.000.000	Terlaksana
20	Semenisasi JL.Ubudiyah Dusun III	2017 APBDes / APBD	250 Meter	Rp 90.000.000	Terlaksana
21	Penanaman Tiang + Pemasangan Jaringan Listrik Dusun I	2017 Kerja Sama Dengan PT. PLN	30 Batang	Rp 45.000.000	Terlaksana
22	Paving Block PDTA Nurul Rachman Dusun II	2017 APBDes / APBD	430 M ³	Rp 45.000.000	Terlaksana
23	Pengerasan Jl.Usaha Tani Dusun III	2017 APBDes / APBD	1600 Meter	Rp 160.000.000	Terlaksana
24	Semenisasi JL.Kaboja Dusun IV	2017 APBDes / APBD	500 Meter	Rp 150.000.000	Terlaksana
25	Pengadaan Instalasi Penerangan Makan Desa	2018 Pendapatan Asli Desa (PAD)	-	Rp 13.900.000	Tidak Terlaksana
26	Pengadaan Instalasi Penerangan Stadion Mini	2018 Pendapatan Asli Desa (PAD)	-	Rp 9.370.000	Tidak Terlaksana
27	Pengadaan KWH PKBM	2018 Pendapatan Asli Desa (PAD)	-	Rp 5.000.000	Tidak Terlaksana
28	Kegiatan Pembangunan Semenisasi Jalan Desa	2018 Alokasi Dana Desa (APBN) Dan PADesa	-	Rp 605.069.000	Belum Selesai
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Suka Damai	2018 Alokasi Dana Desa, PADesa, Bantuan APBD Provinsi	-	Rp 107.520.000	-

Sumber : Data olahan penulis bersumber dari Desa Suka Damai tahun 2019

Berdasarkan data yang penulis sajikan pada tabel di atas, dapat di lihat bahwa pelaksanaan program yang berjalan di Desa Suka Damai sudah di susun dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Suka Damai yang mulai di rencanakan pada tahun 2016 dan akan di mulai pelaksanaannya pada tahun 2017, dan berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, dari banyak jenis program yang telah di rencanakan pada tabel di atas, masih banyak pelaksanaan program yang memang belum berjalan dan beberapa di antaranya di laksanakan tidak sampai pada tahap penyelesaian secara menyeluruh.

Pelaksanaan pembangunan yang telah di susun pada program-program di atas merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dimana dalam prosesnya pembangunan tersebut di jadwalkan pelaksanaannya dalam rentan periode 1 (satu) tahun kerja.

Menurut Siagian, (2006 : 12) Pembangunan merupakan suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dari pembangunan dalam rangka pembinaan bangsa. Pendapat diatas menjelaskan pembangunan merupakan suatu usaha perubahan kearah kehidupan yang layak dan lebih baik yaitu mensejahterahkan kehidupan bangsa secara adil dan merata.

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu desa itu ialah untuk:

- a. Mengembangkan swadaya dan gotong-royong masyarakat agar mampu berperan secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan pedesaan.
- b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Melaksanakan upaya pembangunan secara mandiri yang didorong oleh peran aktif kepala desa sebagai pelaksana pembangunan hal tersebut (Kartono, 2006 : 167).

Pembangunan desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

”pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Selanjutnya, tahapan-tahapan pembangunan desa juga diatur pada Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tepatnya pada pasal 78 ayat (2), di mana dimana pembangunan desa meliputi tahap (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, dan (3) Pengawasan.

Dalam melaksanakan pembangunan Desa yang terencana dan terarah dengan baik maka diperlukan perencanaan, pergerakan, bimbingan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan, tanpa adanya ini semuanya tidak akan dapat berlangsung dan terlaksana dengan baik. Karena itu, perlu adanya seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan.

Untuk melaksanakan fungsinya dimana kepala desa dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan karena dialah penggagas, penggerak, dan penyelenggara serta pelaksana pembangunan didesanya. Untuk melaksanakan sebagai fungsi pelaksana pembangunan secara baik dalam proses pembangunan bukan merupakan hal yang mudah, tidak jarang kepala desa dihadapkan pada kendala-kendala dan kegagalan dalam menjalankan fungsinya tersebut.

Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan semangat otonomi daerah terus berupaya untuk merealisasikan otonomi daerah tersebut terutama pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa menuju

tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri. Namun kenyataan yang terjadi, masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan masih belum terlihat adanya perkembangan-perkembangan menuju kearah kemajuan yang lebih baik dalam menyelenggarakan pemerintahan umum maupun pembangunan. Itu dapat dilihat dari apa yang direncanakan oleh pemerintahan desa tidak terlaksana sepenuhnya, baik itu fisik seperti pembangunan sarana dan prasarana yang di perlukan oleh masyarakat maupun berupa non fisik seperti peraturan desa yang tidak terealisasi sepenuhnya.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintahan Desa Suka Damai memiliki organisasi yang memang di susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan demikian untuk mengatur arah pelaksanaan Pemerintahan desa, maka di bentuklah Visi dan Misi dalam menjalankan Pemerintaha Desa Suka Damai, adapun Visi dari Desa Suka Damai adalah: *“Kebersamaam dalam membangun demi Desa Suka Damai Yang Lebih Maju”*.

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa Suka Damai baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) semangat kebersamaam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dan untuk melengkapi visi yang telah di sebutkan di atas, maka Desa Suka Damai juga telah menetapkan misi yang akan di capai di kemudian hari, dimana misi tersebut adalah:

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan partisipatif.

3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa Suka Damai yang aman, tentram dan damai.
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Suka Damai adalah desa yang di bentuk oleh orang-orang ber-transmigrasi yang datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari beberapa daerah, desa Suka Damai pada mulanya adalah unit pemukiman transmigrasi UPT DI yang datang pada tahun 1982 dengan jumlah sebanyak 300 KK dan sebanyak 1000 Jiwa Penduduk, dengan luas wilayahnya mencapai 1.502 Ha. Pada saat ini desa Suka Damai sudah memiliki populasi penduduk yang terbilang sudah cukup beragam dan tersebar yang disebabkan perkembangan jaman dan pengembangan wilayah di sekitar desa itu sendiri, adapun saat ini Desa Suka Damai memiliki populasi penduduk sekitar 1.746 Jiwa, dan untuk melihat penjelasan lengkapnya, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel I.2 : Rekapitulasi jumlah penduduk Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Sampai Bulan Juli Tahun 2018.

No	Agama	Jenis kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	835 Jiwa	910 Jiwa	1.745 Jiwa
2	Kristen	11 Jiwa	8 Jiwa	19 Jiwa
Jumlah		846 Jiwa	918 Jiwa	1.746 Jiwa

Sumber : Data Olahan Penulis & Kantor Desa Suka Damai Tahun 2019

Dari data yang telah penulis sajikan di atas, penulis dapat memberikan penjelasan tambahan bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Suka Damai adalah Sebanyak 602 Kepala Keluarga (KK).

Berdasarkan penyajian dan juga penjelasan data yang telah penulis paparkan pada latar belakang di atas, di lengkapi dengan hasil obsevasi (pengamatan) penulis dilapangan, maka penulis menemukan beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi fenomena dalam penyusunan penelitian penulis pada saat ini yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”. Adapun fenomena masalah yang penulis temukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan (Pra Survey), penulis menemukan fenomena bahwa pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Suka Damai tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan yang telah di tetapkan dalam penyusunan program pembangunan fisik desa, hal ini dapat di lihat pada data yang telah penulis sajikan pada halaman 10 (sepuluh) bahwa masih banyak program pembangunan fisik yang belum terjadi dilapangan, sementara anggaran sudah di tetapkan oleh pemerintah desa suka damai.
2. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, penulis menemukan fenomena bahwa pihak pemerintah desa suka damai tidak melakukan proses transparansi proses pembangunan yang dilakukan di desa suka damai, hal ini dapat di lihat dengan tidak adanya informasi yang diberikan kemasyarakat terkait dengan proses pembangunan dan proses anggaran pendanaan yang dilakukan dalam pembangunan fisik desa.
3. Tidak terlaksananya proses sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan

program pembangunan fisik desa suka damai, dampak dari hal ini tentunya masyarakat tidak mengetahui apa rencana pembangunan yang akan di lakukan oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk ikut melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan program pembangunan yang terjadi di desa suka damai kecamatan singing hilir kabupaten kuantan singing.

Dengan adanya permasalahan yang telah penulis jelaskan pada fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Suka Damai dengan mengangkat judul “*Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka Kepala Desa Suka Damai memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan proses pembangunan fisik yang terjadi di desa suka damai, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang penulis temui dilapangan, baik di dasari dengan data yang penulis dapatkan ataupun berdasarkan hasil observasi (pra-survey) yang telah penulis lakukan secara langsung, maka penulis dapat menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Di Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Adapun tujuan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dibidang administrasi Pemerintahan Desa.
 - b. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian pada bidang dan kasus yang sama.
 - c. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pegawai di kantor Desa khususnya di Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir dalam rangka meningkatkan pembangunan fisik di desa tersebut.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi dan pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembacaan meningkatkan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian

1. Konsep Administrasi

Secara *etimologis*, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administratio* yang berarti pembantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. Di Italia disebut juga *amministrazione*. (Syafri, 2012:3)

Administrasi terbagi dua, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/ kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan, (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/ institusi. Sementara administrasi dalam arti luas yakni proses (rangkaiannya) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. (Syafri, 2012:3-4).

Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian. 2003;2)

“Administrasi dalam (Siagian. 2003;2-3) menurut defenisinya dibagi beberapa hal. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya dan akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai beberapa unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilakukan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas empat, itu. Kedalam peralatan dan perengkapan juga termasuk pula waktu, tempat, peralatan, materi serta sarana lain. Ketiga, bahwa administrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Tegasnya, administrasi sebagai seni merupakan suatu fenomena sosial”.

Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu organisasI. Administrasi menurut Nawawi (dalam Syafiie, 2005;5) adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian administiras sering dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.

“Secara terminologi apa yang disebut “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe danakhiran an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan apalagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya”.(Farid Alie (2000; 19).

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2009;11) juga menjelaskan bahwa kerjasama manusia dalam mencapai tujuan, sebagai objek studi ilmu administrasi terdapat sepuluh dimensi penting yang perlu dipahami dalam konsep administrasi yaitu:

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modren. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi tidak akan sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau energi atau hayat adalah 'administrator' yang harus pandai mengerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas manajer, staffer, dan personilnya.
- c. Administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staffer.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan 'badan pimpinan' dari pada suatu organisasi.
- e. Adminietrasi merupakan suatu seni (*art*) yang merupakan bakat, ilmu pengetahuan dan pengalaman.
- f. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui organisasi.
- g. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu (*administrative behaviour or administration as special type of social behaviour*) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu type tingkah laku manusia tertentu (*special type of behaviour*).
- h. Administrasi merupakan suatuteknik atau praktek yang tertentu, suatu tatacara yang merupakan kemampuan atau mengerjakan sesuatu yang

memerlukan kemampuan atau mengerjakan kemampuan, kemahiran, keterampilan, yang hanya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

- i. Administrasi merupakan suatu sistem yang tertentu, yang merupakan input, transformasi, pengelolaan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu manajemen tertentu yang merupakan 'overall management' dari suatu organisasi. Pada hakekatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumberdaya-sumberdaya menuju tercapainya suatu prapta (*objective*) tertentu. Sumberdaya-sumberdaya (*resources*) dimaksud meliputi : orang-orang (*man*), uang (*money*), mesin-mesin (*machines*), bahan atau peralatan (*material*), tenaga atau energi (*energy*), dan waktu (*time*). Dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas dan tanggung jawab, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

Jadi, administrasi merupakan rangkaian aktifitas-aktifitas atau kegiatan-kegiatan kerja sama yang telah terarah dalam organisasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia dalam organisasi guna mencapai satu atau beberapa tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam hal ini, administrasi yang dimaksud adalah rangkaian aktifitas pelaksanaan tugas oleh kepala Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan pembangunan yang merata, berkesinambungan, efektif dan efisien sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan administrasi mengarahkan pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien, dan organisasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Organisasi menurut Siagian (2003:6) adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka

pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Gaus (dalam Hamim 2005:13) menyatakan organisasi sebagai tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada semua anggota organisasi, akan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang mana organisasi memiliki keragaman yang nantinya akan memberikan dampak bagi organisasi tersebut.

Organisasi menurut Waldo (dalam Hamim, 2005:13) merupakan struktur hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan dalam suatu sistem administrasi. Rancangan struktur yang baik akan tergambar kegiatan sekaligus monitoring efektivitas dan perhatian terhadap manfaat struktur tersebut.

Menurut Manulang (dalam Hasibuan, 2009 : 24) organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, penetapan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerjasama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan.

Organisasi menurut Siswanto (2005:73) adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Organisasi minimal mengandung tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang, interaksi dan kerja sama, dan tujuan bersama.

Aspek dari organisasi yang dikemukakan oleh Weber (dalam Thoha, 2011:166) ialah bahwa suatu organisasi atau kelompok kerjasama mempunyai unsur-unsur *Properties* sebagai berikut:

- a. Organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut.
- b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*bounderies*). Dengan demikian, seseorang individu yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak didasarkan atas kemauan sendiri. Akan tetapi, mereka dibatasi oleh peraturan-peraturan tertentu.
- c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan ini menyusun proses interaksi diantara orang-orang yang bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
- d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Istilah lain dari fungsi ini ialah terdapatnya hierarki. Konsekuensi dari adanya hierarki ini ialah bahwa didalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staff.

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan
- b. Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal

Organisasi sebagai wadah dan rangkaian hierarki tentunya harus memiliki prinsip-prinsip yang mampu mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dari beberapa definisi dan penjelasan yang telah disampaikan oleh beberapa ahli tersebut, maka hal itu dapat membuktikan bahwa dewasa ini

masyarakat dimanapun berada tidak terlepas dari praktik-praktik organisasi dalam kehidupannya.

Dilingkungan masyarakat, baik itu organisasi formal maupun informal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain yang merupakan bentuk organisasi secara hierarki. Organisasi yang baik adalah organisasi yang secara bersama-sama mampu mewujudkan tujuan bersama dan menerapkan prinsip dasar secara seimbang dalam kehidupannya. Dalam penelitian ini bentuk organisasi yang dimaksud adalah pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja (*to manage*) yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang disertai tugas memimpin dan mengurus suatu tugas, lembaga, usaha dan sebagainya. Menurut Millet, manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan (dalam Siswanto 2005;1)

Menurut Afifudin, (2013;2) Manajemen merupakan disiplin ilmu yang bertugas mencari kebenaran dalam predikat dimensi teoritis dan metodologi yang harus di uji dan dibuktikan berdasarkan fakta/data secara objektif kebenarannya. Oleh karena itu manajemen sebagai ilmu penting untuk dikembangkan agar didapatkan kebenaran ilmu.

Sementara menurut Siswanto (2005;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Menurut Siagian (2003) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Dari penjelasan diatas manajemen diartikann sebagai seni dan ilmu, yaitu seni yang dimaksud sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan, sementara manajemen suatu ilmu ialah akumulasi pengetahuan yang telah disistematiskan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum (*general purpose*) (dalam Siswanto 2005;3)

Menurut Terry (dalam Hamim, 2003; 36) manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan planing, organizing, actuating, dan *controlling*, dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahliandan yang diikuti secaraberurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, administrasi, dan sebagainya.

Menurut Stoner, (dalam Zulkifli, 2009;16) Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian proses yang sangat penting dalam melaksanakan rutinitas kehidupan organisasi. Karena manajemen ialah akumulasi kemampuan dan keahlian yang sangat kompleks baik dari hubungan kerja, produktifitas kerja, dan rangkaian aktifitas lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang terarah.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.

Fenomena sosial pada masa kini dan masa depan dalam era globalisasi ini, yang sangat menentukan adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak, dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut, tenaga, waktu dan kemampuannya benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun bagi kepentingan individu. Indrastuti (2014;1) mengemukakan pengertian Manajemen sumber daya manusia adalah:

“Suatu cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu yang di manage oleh para profesional SDM dan Manajer sehingga 6M (Machine, Material, Money, Methoda dan Market) dapat dikelola secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapainya tujuan (goal) perusahaan.”

Menurut Hasibuan (2000;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Menurut Fathoni (2006;10) Manajemen SDM adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia.

Hubungan manajemen dengan sumber daya manusia merupakan proses usaha pencapaian tujuan melalui kerja sama dengan orang lain, ini berarti menunjukkan pemanfaatan daya yang bersumber dari orang lain. Untuk itu MSDM perlu dikelola secara profesional dan baik agar dapat terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci

utama suatu organisasi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar. Adapun tujuan dan aktivitas manajemen sumber daya manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Rachmawati (2007;14), tujuan MSDM adalah untuk meningkatkan dukungan SDM guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi dan mengapa organisasi harus melakukannya, berkaitan dengan kegiatan MSDM.

Menurut Sedarmayanti (2000;6) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarik seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi.

Menurut Sedarmayanti (2009;6) Manajemen sumber daya manusia adalah seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, kegiatan sumber daya manusia atau pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan sebelumnya.

Kegiatan atau aktivitas MSDM secara umum adalah tindakan – tindakan yang diambil untuk membentuk satuan kerja yang efektif dalam suatu organisasi. Sedarmayanti (2009;6)

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan manajemen sumber daya manusia adalah proses penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan, baik individu maupun organisasi yang akan menentukan kerja seorang pegawai. Dengan sumber daya yang berkualitas maka Profesionalisme kinerja pegawai akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di sebuah organisasi pemerintahan, contohnya seperti kantor Desa Suka Damai.

5. Konsep Pelayanan Publik

Memperhatikan arti tentang pelayanan umum, tidak terlepas dari masalah kepentingan umum yang menjadi asal usul timbulnya istilah pelayanan umum. Pelayanan berarti melayani suatu jasa sesuai jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas dari fungsi pokok birokrasi pemerintah.

Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut :

“Pelayanan publik adalah sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Pengertian pelayanan dan pelayanan publik di atas dapat disimpulkan sebagai pemberian pelayanan (melayani) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah) sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan Menurut Tampubolon (dalam Sitorus 2009;55) Mendefinisikan Pelayanan adalah melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, pelayanan diartikan (1) adanya pihak yang melayani disebut

pelayan. (2) pihak yang dilayani disebut pelanggan. (3) terjadi proses melayani-dilayani atau memberi-menerima.

Menurut Kotler (2002;83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Klasifikasi pelayanan dapat membantu memahami batasan dari industry pelayanan dan memanfaatkan pengalaman industry pelayanan lainnya yang mempunyai masalah dan karakteristik yang sama untuk diterapkan pada suatu bisnis pelayanan.

Menurut Moenir (2008;16) menyatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung.

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman yang di kutip oleh Sinambela (2010;4) Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Sampara yang di kutip oleh Sinambela (2010;5) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Menurut Subarsono (dalam Agus Dwiyanto, 2005;141) pelayanan public adalah :

”Pelayanan Publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan KTP, akta nikah, akta kematian, sertifikat.”

Sedangkan Departemen Dalam Negeri (2004) menyebutkan bahwa:

“Pelayanan Publik adalah Pelayanan Umum dan mendefinisikan Pelayanan Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara- cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”.

Menurut Widodo (2001;131) Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan.

Menurut Sinambela (2007;6) Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
3. Kodisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan Publik.

Menurut Gronroos (dalam Ratminto & Atik, 2008;2) menyatakan didalam bukunya pengertian dari pelayanan adalah

“Suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal- hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.”

Selanjutnya yang dimaksud pelayanan menurut Moenir (2000;27) adalah serangkaian dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Karena itu pelayanan dapat merupakan suatu proses, sebagai proses pelayanan berlangsung serta rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Kotler dalam Lukman (2000;8) menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan keputusan, meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk fisik yang disediakan.

Sedangkan menurut Toha dalam Sedarmayanti (2004;82) pelayanan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan menurut pelaksanaannya.

Menurut Sugiarto (2003;26) bahwa pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, klien, pasien, penumpang, dll) pada tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani dan dilayani.

Menurut Agung Kurniawan (2005;4) menyatakan bahwa pelayanan public dapat diartikan pemberi layanan (melayani) keperluan orang/masyarakat yang

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Mahmudi (2005;229) mengatakan pelayanan public adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan public dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hidayat dan Sucherly dalam Kumorotomo (2005;163) :

“pelayanan hendaknya diberikan secara adil dan merata, bila perlu pelayanan yang sudah tidak terjangkau lagi oleh jaringan birokrasi pemerintah dapat diserahkan kepada pihak- pihak swasta, dengan demikian akan tercipta persaingan yang sehat bagi organisasi- organisai pelayanan pablik dan masyarakat akan mendapat atau memperoleh kalitas pelayanan yang maksimal.”

Di Indonesia, penggunaan istilah pelayanan publik (*public service*) dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebut dipergunakan secara dapat ditukarkan dan dianggap tidak memiliki perbedaan mendasar dalam hal prakteknya di lapangan secara langsung.

Menurut Moenir (dalam Nogi 2005;208), pelayanan adalah:

”proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada 2 (dua) jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi kepala si penerima layanan, baik itu organisasi massa atau negara.”

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahsum (2006;16) Karakteristik khusus dari pelayanan publik yang membedakannya dari pelayanan swasta adalah:

1. Sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa, dan barang tak nyata. Misalnya perijinan, sertifikat, peraturan, informasi keamanan, ketertiban, kebersihan, transportasi dan lain sebagainya.
2. Selalu terkait dengan jenis pelayanan-pelayanan yang lain, dan membentuk sebuah jalinan sistem pelayanan yang berskala regional, atau bahkan nasional. Contohnya dalam hal pelayanan transportasi, pelayanan bis kota akan bergabung dengan pelayanan mikrolet, bajaj, ojek, taksi dan kereta api untuk membentuk sistem pelayanan angkutan umum di Jakarta.
3. Pelanggan internal cukup menonjol, sebagai akibat dari tatanan organisasi pemerintah yang cenderung birokratis. Dalam dunia pelayanan berlaku prinsip utamakan pelanggan eksternal lebih dari pelanggan internal. Namun situasi nyata dalam hal hubungan antar lembaga pemerintahan sering memojokkan petugas pelayanan agar mendahulukan pelanggan.
4. Efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian akan semakin tinggi pula peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayanan.
5. Masyarakat secara keseluruhan diperlakukan sebagai pelanggan tak langsung, yang sangat berpengaruh kepada upaya-upaya pengembangan pelayanan. Desakan untuk memperbaiki pelayanan oleh polisi bukan dilakukan oleh hanya pelanggan langsung (mereka yang pernah mengalami gangguan keamanan saja), akan tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.

6. Tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing

Dasar untuk menilai suatu kualitas pelayanan selalu berubah dan berbeda.

Apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan yang berkualitas saat ini tidak mustahil dianggap sebagai suatu pelayanan yang tidak berkualitas pada saat yang lain. Maka kesepakatan terhadap kualitas sangat sulit untuk dicapai.

Tujuan pelayanan publik menurut Juliantara (2005;10) adalah:

“Memuaskan atau sesuai dengan keinginan masyarakat/pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas/mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan. Dan Hakekat dari pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.”

Menurut Undang-undang No.15 Tahun 2014 Bab III tentang Pedoman Standar Pelayanan menyatakan Komponen Standar Pelayanan terbagi atas 2 yaitu:

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*seervice delivery*) meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen atau barang/hal lain, tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seseorang untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.

3. Jangka waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan.

4. Biaya/tarif

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk pelayanan

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang ditetapkan.

2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan. Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara lain : penyediaan kotak saran/kotak

pengaduan, sms, portal, pengaduan website, dan penyediaan petugas penerima pengaduan.

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

- 1) Dasar Hukum
- 2) Saran dan prasarana, atau fasilitas
- 3) Kompetensi pelaksanaan
- 4) Pengawasan internal
- 5) Jumlah pelaksanaan
- 6) Jaminan Pelayanan

Keberhasilan proses pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni : Pertama, aspek proses internal organisasi birokrasi (pelayan); kedua, aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan.

Organisasi publik mempunyai ciri public accountability, yaitu setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan,. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan untuk dikenali baik sebelum proses, dalam proses, atau setelah proses pelayanan itu diberikan kepada si penerima layanan.

6. Konsep Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “kebijakan” digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor dalam suatu bidang tertentu. Anderson (dalam Indiahno (2009;17) mendefenisikan kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Menurut Friedrich (dalam Winarno(2002;20) kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu Linblom (dalam Winarno 2002;35) menjelaskan ada 5 indikator didalam pembuatan sebuah kebijakan publik, diantaranya:

1. Perumusan masalah (Penyusunan Agenda)
Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
2. Forecating (Formulasi kebijakan)
Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan.
3. Rekomendasi kebijakan (Adopsi kebijakan)

Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

4. Monitoring kebijakan (Implementasi kebijakan)

Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

5. Evaluasi kebijakan (penilaian kebijakan)

Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Kelima indikator ini penting diperhatikan setiap merumuskan sebuah kebijakan oleh para pembuat kebijakan pencapaian didalam perumusan sebuah kebijakan akan tepat sasaran dalam implementasinya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

7. Konsep Evaluasi

Evaluasi biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana kesuksesan kinerja kebijakan publik, guna untuk dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sejauh mana tujuan di capai, maka evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan dengan “kenyataan. Kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan keputusan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Menurut Subarsono (2015 : 123) alasan evaluasi kebijakan public adalah (1) untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, (2) mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, (3) memenuhi aspek akuntabilitas, (4) menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan, (5) agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Adapun menurut Ndraha (1989:201) Evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Evaluasi biasanya ditunjukan untuk menilai sejauh mana kesuksesan kinerja kebijakan public, guna untuk dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sejauh mana tujuan dicapai, maka evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan ”kenyataan”. Kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan keputusan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Arikunto dan Cepi (dalam Afifudin (2013;251) Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Menurut Subarsono (2005:123) alasan evaluasi kebijakan adalah:

- 1) untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan;
- 2) mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal;
- 3) memenuhi aspek akuntabilitas public;
- 4) menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan;
- 5) agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaiknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Menurut Dunn (2000;613-615) ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni :

1. Evaluasi semu (*pseudoevaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, dan masyarakat.

2. Evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan
3. Evaluasi proses keputusan teoritis (*desion theoretic evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan secara ekplisid diinginkan oleh berbagai *stakeholders*.

Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi memiliki beberapa tujuan sebagai berikut (Mulyadi, 2015:92) :

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan
- e. Untuk mnegtahui apabila ada penyimpangan
- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan

Menurut Dunn (2003; 609-610), fungsi-fungsi evaluasi yaitu:

- a. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai
- b. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.
- c. Evaluasi memberikan aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Menurut Finance (dalam Bajuri dan yuwono; 2002:135). Evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh *input*, *proses*, *outputs*, dan *outcomes*. Selain itu, evaluasi juga merupakan proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Oleh karenanya ada baiknya jika diketahui terlebih dahulu empat aspek dalam evaluasi yang sekaligus akan menjadi indikator dari variabel evaluasi tersebut. Berikut penjelasannya

1. *Input* yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk itu, dikembangkan instrumen yang meliputi indikator-indikator
 - a. Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/prasarana)
 - b. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi)
2. *Proses* yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu, dikembangkan instrumen yang meliputi indikator-indikator:
 - a. Tepat sasaran atau tidak
 - b. Tepat guna atau tidak
 - c. Efisiensi atau tidak
3. *Outputs* (hasil). Yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Untuk itu, dikembangkan instrumen dengan indikator-indikator sebagai berikut :
 - a. Tepat tidaknya sasaran yang dituju
 - b. Berapa besar sasaran yang tercakup
 - c. Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani
 - d. Seberapa besar kelompok yang terlibat
4. *Outcome* (dampak). Yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Untuk itu, dikembangkan instrumen dengan indikator:

- a. Ada atau tidak perubahan pada target/sasaran
- b. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran
- c. Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Begitu juga dengan halnya pada pelaksanaan tugas kepala desa maka perlu dilakukan dan diiringi dengan aktifitas evaluasi agar kebijakan atau program yang telah dirumuskan dapat tercapai secara sistematis dan terarah

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memerhitungkan dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Evaluasi menurut Ndraha (2003: 201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

- 1) Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (prilaku treatment) tolak ukurannya adalah *before*.
- 2) Model *das solen-das* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
- 3) Model kelompok *control*-kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok *control* (Ndraha,2003:202).

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Duun (dalam Subarsono, 2013; 126), mencakup lima indikator yaitu:

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah

3. Pemerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
4. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuat prefensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
5. Ketepatan, apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Menurut Sondang P. Siagian (2002: 147) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan dicapai. Artinya melalui penilaian harus dapat ditemukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

8. Konsep Pelaksanaan Tugas

Siagian (2005:126) Mengatakan bahwa pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Sementara itu pengertian dari kata tugas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggu jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan.

Pelaksanaan tugas merupakan suatu kewajiban bagi para anggota dalam suatu organisasi, karena terdapat suatu tujuan yang sama yaitu mengharapkan hasil yang baik. Untuk mencapai tujuan dengan hasil yang baik maka setiap organisasi memiliki peraturan dalam bentuk kebijakan yang bertujuan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan tanpa pelaksanaan tugas perencanaan menjadi sia-sia dan tujuan pun tidak akan tercapai, setelah pelaksanaan tugas dilakukan barulah proses lain bisa dijalankan.

Menurut Satropetro (1982;183) Pelaksaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya

Tjokroamudjoyo (dalam Adisasmita, 2011;24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan ini diturunkan dalam suatu progam dan proyek.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, pelaksanaan berarti wujud nyata dari program atau pembangunan dilakukan oleh kepala desa dibantu dengan perangkat desa dalam mewujudkan pengembangan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yaitu *Actuating*.

Yoder (dalam Moekijat, 1998;10) berpendapat bahwa tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Selain itu juga ada pendapat ahli lain seperi Stone (dalam Moekijat, 1998;10) mengemukakan pendapatnya bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa dalam upaya peningkatan pembangunan di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sehingga mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang pedeman pada Undang-Undang dasar Nega Republik Indonsia.

Selanjutnya penulis akan menyajikan konsep yang mendukung untuk pelaksanaan penelitian ini di mana konsep yang akan disajikan selanjutnya adalah konsep tentang Pembangunan Desa.

9. Konsep Pembangunan Desa

Menurut Siagian, (2006 : 91), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintahan dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar. Artinya, Pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Mencermati beberapa defenisi pembangunan diatas dan sesuai dengan pemahaman penulis, maka yang dimaksud dengan pelaksana pembangunan dalam penelitian ini adalah Seseorang dalam hal ini Kepala Desa sebagai “pelaksana pembangunan” didesa yang dipimpinya, harus mampu mengimplementasikan fungsinya dalam perumusan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan, serta mampu menyelenggarakan pemerintahannya secara efektif dan efisien. Disamping menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, merencanakan program pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakatnya juga harus mengambil kebijakan-kebijakan yang urgen dan strategis demi tercapainya program pembangunan pedesaan

Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000;21)

1. Ketahanan (Sustenance): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (Self Esteem): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.

3. Freedom from servitude: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Sementara itu, menurut Ndraha (2005 : 5) mengatakan bahwa fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan adalah :

1. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa. Perencanaan yang baik adalah apabila kepala desa dalam membuat suatu perencanaan menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dari pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan, selanjutnya kepala desa hendaknya cepat tanggap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau kelompok masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.
2. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan. Pengarahan merupakan pergerakan dan pengendalian semua sumber dalam usaha pencapaian sasaran. Merupakan penyatuan semua usaha dan penciptaan kerjasama, dalam memberikan pengarahan kepala desa sebaiknya memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparat desa untuk selalu bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan.
3. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan Desa. Pengambilan keputusan adalah memilih suatu alternatif dari dua pilihan atau lebih, dalam mengambil keputusan yang baik kepala desa harus menanggapi keinginan masyarakat desa sehingga keputusan yang diambil benar-benar keputusan dan kebutuhan masyarakat, kemudian keputusan yang diambil haruslah tegas dan konsisten dan bawahan merasa keputusan yang diambil memang alternatif terbaik untuk masyarakat.

4. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa. Mengkoordinir atau pengorganisasian adalah pengurusan semua sumber dan tenaga yang ada dengan landasan konsepsi yang tepat, dan penentuan masing-masing fungsi (persyaratan tugas, tata kerja, tanggung jawab, dan antar relasi dari masing-masing fungsi); sehingga merupakan suatu totalitas sistem, dimana bagian yang satu menunjang dan bergantung (saling bergantung) pada bagian yang lainnya. Ringkasnya tugas pokok dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut : (a) Membagi tugas kerja, (b) Membentuk kelompok-kelompok atau unit kerja.
5. Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan dan kontroling perlu dilaksanakan dalam pembangunan pedesaan agar para pekerja dapat bekerja dengan baik kearah pencapaian sasaran-sasaran dan tujuun, pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan, dan menghindari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan yang baik adalah apabila kepala desa memonitor hasil pekerjaan dan segera melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

Dalam teori pembangunan desa dari Rondinelli yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti malakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dll.

Pembangunan desa, bukan yang hal baru lagi di Indonesia ini, yang bertujuan untuk menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pedesaan. Dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan masyarakat. Melihat konsep pembangunan Desa Terpadu yang merupakan suatu strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa (Poostchi,1986:117).

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (outsider stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu.

Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.

Midgley (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses.

Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (*Strategies for Social Development by Governments*). Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, apalagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya didesentralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan. Peran pemerintah terbatas dalam hal penyediaan dana stimulan dan memfasilitasinya.

Dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan desa telah menempatkan perlakuan terhadap masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu berarti dan sentral. Sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi titik penentu apakah proses pembangunan itu menjadi wahana proses belajar atau hanya

sekedar sebuah rekayasa yang mana pemerintah menjadi pemain tunggal. Dengan demikian penekanan pada aspek “proses” memiliki arti penting. Proses belajar mengandung makna bahwa setiap kekurangan dan kelemahan yang muncul dalam proses pelaksanaan program pembangunan menjadi informasi yang penting dan untuk itu dilakukan upaya-upaya penanggulangannya.

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Menurut Haeruman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

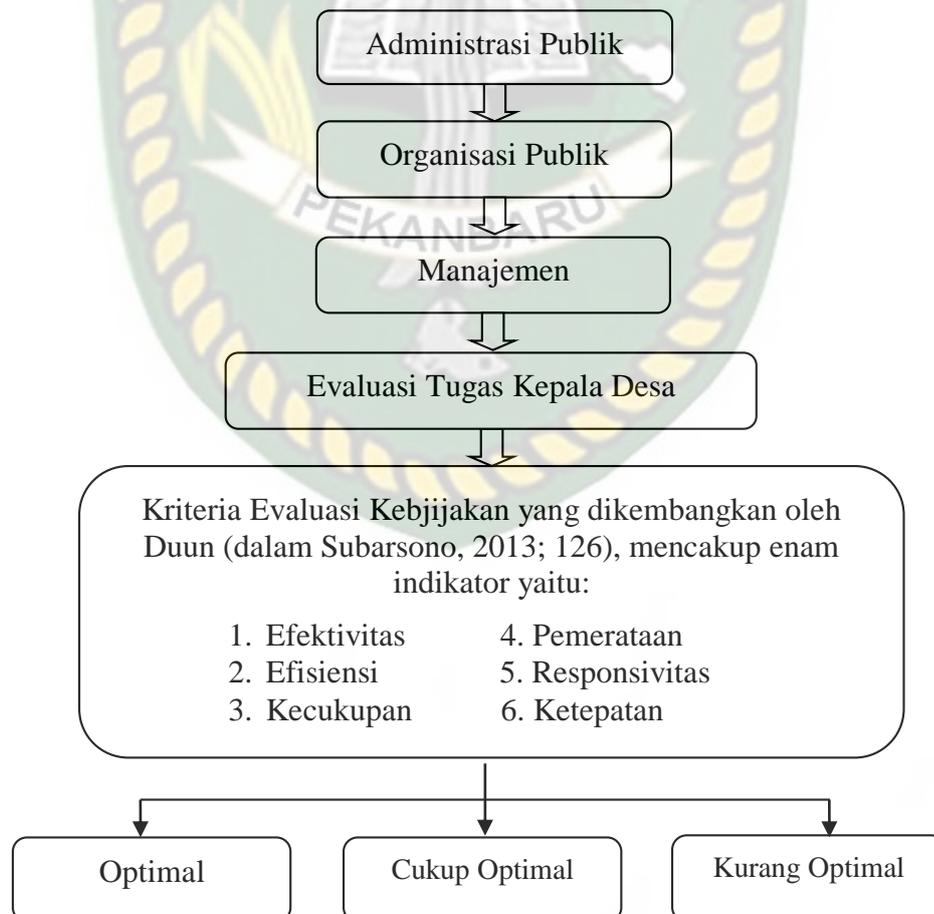
- 1) Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
- 2) Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Sesuai dengan konsep dan teori-teori yang telah dikemukakan, maka kerangka pikir dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. dapat dijelaskan melalui gambar bagan sebagai berikut:

Gambar II.I : Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber : Olahan Penulis Tahun 2018

C. Hipotesis

Berdasarkan penejelasan pada latar belakang dan teori-teori serta di lengkapi dengan pelaksanaan observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, maka penulis dapat menetapkan hipotesis dalam penelitian adalah “Diduga bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel tunggal yaitu Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepada Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Suka Damai, dan untuk mengetahui pelaksanaan tugas tersebut, penulis telah menentukan 6 indikator evaluasi kebijakan publik dimana diantaranya adalah: (1) Efektifitas, (2) Efektifitas (3) Kecukupan, (4) Pemerataan, (5) Responsivitas, (6) Ketepatan.

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dimulai dari proses pemikiran, proses pelaksanaan sampai proses tercapainya tujuan.
2. Organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka di buat norma aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi.
3. Manajemen merupakan disiplin ilmu yang bertugas mencari kebenaran dalam predikat dimensi teoritis dan metodologi yang harus di uji dan

dibuktikan berdasarkan fakta/data secara objektif kebenarannya. Oleh karena itu manajemen sebagai ilmu penting untuk dikembangkan agar didapatkan kebenaran ilmu.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.
5. Pelayanan publik adalah sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
7. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.
8. Pelaksanaan tugas adalah hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan.
9. Pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program

dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas.

10. Indikator Variabel Penelitian:

a. Efektivitas.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauhmana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

b. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkosnya. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

c. Kecukupan.

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

d. Pemerataan.

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

e. Responsivitas.

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan.

f. Ketepatan.

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasionalisasi Variable Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Secara umum istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (<i>appraisal</i>), pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>assessment</i>), katakata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. (Dunn, 2003:608).	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepada Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai.	1. Efektivitas	a. SDM pelaksana tugas program mencukupi. b. Ketersediaan anggaran dan Kelengkapan sarana dan prasarana.	Optimal Cukup Optimal Kurang Optimal
		2. Efisiensi	a. Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai dengan Waktu yang telah ditentukan b. Penyediaan bahan-bahan material sesuai dengan bangunan yang akan dilaksanakan	Optimal Cukup Optimal Kurang Optimal
		3. Kecukupan	a. Program yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. b. Perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan Program.	Optimal Cukup Optimal Kurang Optimal
		4. Pemerataan	a. Pembangunan yang adil dan merata di setiap daerah dalam desa. b. Jumlah Anggaran Tidak Berbeda dengan pembangunan yang sama.	Optimal Cukup Optimal Kurang Optimal
		5. Responsivitas	a. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pembangunan. b. Menerima saran, kritik dan masukan dari masyarakat Desa.	Optimal Cukup Optimal Kurang Optimal
		6. Ketepatan	a. Pembangunan fisik telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. b. Ketepatan dalam proses pelaksanaan pembangunan.	Optimal Cukup Optimal Kurang Optimal

Sumber : *Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik (William N. Dunn, 2003;610)*

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini adalah menggunakan skala likert diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) dengan skor tertinggi yaitu Optimal (3 Skor), Cukup Optimal (2 Skor) dan yang terakhir adalah Kurang Optimal (1 Skor). Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------|--|
| Optimal | Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berada pada skala pengukuran di antara 67%-100% |
| Cukup Optimal | Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berada pada skala pengukuran di antara 34% - 66% |
| Kurang Optimal | Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berada pada skala pengukuran di antara 1% - 33% |

1. Efektivitas

Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian tentang Efektivitas berada pada skala pengukuran 67% - 100%.

Cukup Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian tentang Efektivitas berada pada skala pengukuran 34% - 66%.

Kurang Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian tentang Efektivitas berada pada skala pengukuran 1% - 33%.

2. Efisiensi

Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yaitu tentang Efisiensi berada pada skala pengukuran 67% - 100%.

Cukup Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yaitu tentang Efisiensi berada pada skala pengukuran 34% - 66%.

Kurang Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yaitu tentang Efisiensi berada pada skala pengukuran 1% - 33%.

3. Kecukupan

Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yaitu tentang Kecukupan berada pada skala pengukuran 67% - 100%

Cukup Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yaitu tentang Kecukupan berada pada skala pengukuran 34% - 66%

Kurang Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yaitu tentang Kecukupan berada pada skala pengukuran 1% - 33%

4. Pemerataan

Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yaitu tentang Pemerataan berada pada skala pengukuran 67% - 100%

Cukup Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yaitu tentang Pemerataan berada pada skala pengukuran 34% - 66%

Kurang Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yaitu tentang Pemerataan berada pada skala pengukuran 1% - 33%

5. Responsivitas

Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yaitu tentang Responsivitas ada pada skala pengukuran 67%-100%

Cukup Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yaitu tentang Responsivitas ada pada skala pengukuran 34% - 66%

Kurang Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yaitu tentang Responsivitas berada pada skala pengukuran 1% - 33%

6. Ketepatan

Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yaitu tentang Ketepatan berada pada skala pengukuran 67% - 100%

Cukup Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yaitu tentang Ketepatan berada pada skala pengukuran 34% - 66%

Kurang Optimal : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator penelitian yaitu tentang Ketepatan berada pada skala pengukuran 1% - 33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sementara itu menurut Siregar (2012:2) “Deskriptif penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga mudah dipahami”. Metode ini bertujuan mendapatkan gambaran yang benar mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian Survey Deskriptif. Menurut Iskandar (2008:66) penelitian Survei Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala yang ada di sekitar tempat penelitian, ciri khas penelitian ini adalah data penelitian dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada sampel dalam penelitian.

Penelitian deskriptif menurut adalah penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti (dalam Sugiyono 2003:11). Penelitian ini bermaksud untuk memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian, hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi sehingga diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas dari hasil analisa penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009;41), penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variable-variabel yang diteliti. Penelitian ini berlokasi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, alasan lain yaitu dikarenakan Berdasarkan hasil Pra Survey penulis dilapangan, penulis menemukan fenomena bahwa pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Suka Damai tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan yang telah di tetapkan dalam penyusunan program pembangunan fisik desa, hal ini dapat di lihat pada data yang telah penulis sajikan pada halaman 10 (sepuluh) bahwa masih banyak program pembangunan fisik yang belum terjadi dilapangan, sementara anggaran sudah di tetapkan oleh pemerintah desa suka damai.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Arikunto (2006;130) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan elemen-elemen yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Suka Damai, Sekretaris Desa Suka Damai, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Damai, dan yang terakhir adalah Masyarakat di Desa Suka Damai. Untuk mengetahui rincian masing-masing populasi dan sampel dalam penelitian ini maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel. III.1 : Jumlah Populasi Penelitian Tentang Evaluasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa Suka Damai.

No	Nama Desa	Jumlah Populasi
1	Kepala Desa Suka Damai	1 Orang
2	Sekretaris Desa Suka Damai	1 Orang
3	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Damai	5 Orang
4	Masyarakat Desa Suka Damai	1.746 Orang
Jumlah		1.755 Orang

Sumber: Data Olahan Penulis Dan Kantor Desa Suka Damai, Tahun 2019.

2. Sampel

Menurut Iskandar (2005;69) sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau sebagian kecil yang diamati. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 64 orang, yang terdiri dari Kepala Desa Suka Damai, Sekretaris Desa Suka Damai, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Damai, dan yang terakhir adalah Masyarakat di Desa Suka Damai.. Untuk melihat keseluruhan sampel pada penelitian ini maka penulis menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel. III.2 : Jumlah Sampel Penelitian tentang Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Suka Damai.

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa Suka Damai	1	1	100 %
2	Sekretaris Desa Suka Damai	1	1	100 %
3	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Damai	5	5	100 %
4	Masyarakat Desa Suka Damai	1.746	57	3.00 %
Jumlah		1.755 Jiwa	64 Jiwa	2.00 %

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2019.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian untuk menentukan sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teknik penarikan sampel yaitu sampling jenuh (sensus) dan *incidental sampling*.

Menurut Sugiyono (2012;85) sampling jenuh (sensus) merupakan teknik penentuan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik sampling jenuh untuk menetapkan sampel yaitu , Kepala Desa Suka Damai, Sekretaris Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini dikarenakan jumlah populasi yang sangat sedikit sehingga penulis menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel.

Selain itu penulis juga menggunakan teknik *incidental sampling* (sampling insidental). Sampling insidental merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ketetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (dalam Sugiyono, 2010;96).

Teknik insidental sampling digunakan untuk menentukan sampel penelitian yaitu masyarakat Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuatan Singingi yaitu sebanyak 57 sampel responden.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

- b. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersipat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data gambaran umum Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi, serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab kepada pihak terkait seperti Kepala Desa Suka Damai, Sekretaris Suka Damai, Dan BPD Suka Damai, dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Kuisisioner.

Dalam penelitian ini lembaran pertanyaan disebarakan kepada Masyaakat di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan alasan karena jumlahnya yang besar dan tidak bisa dilakukan wawancara secara langsung secara satu persatu.

c. Observasi.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari Kantor Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian.

d. Studi Dokumentasi.

Studi dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan mendapatkan konsep teori penelitian ini.

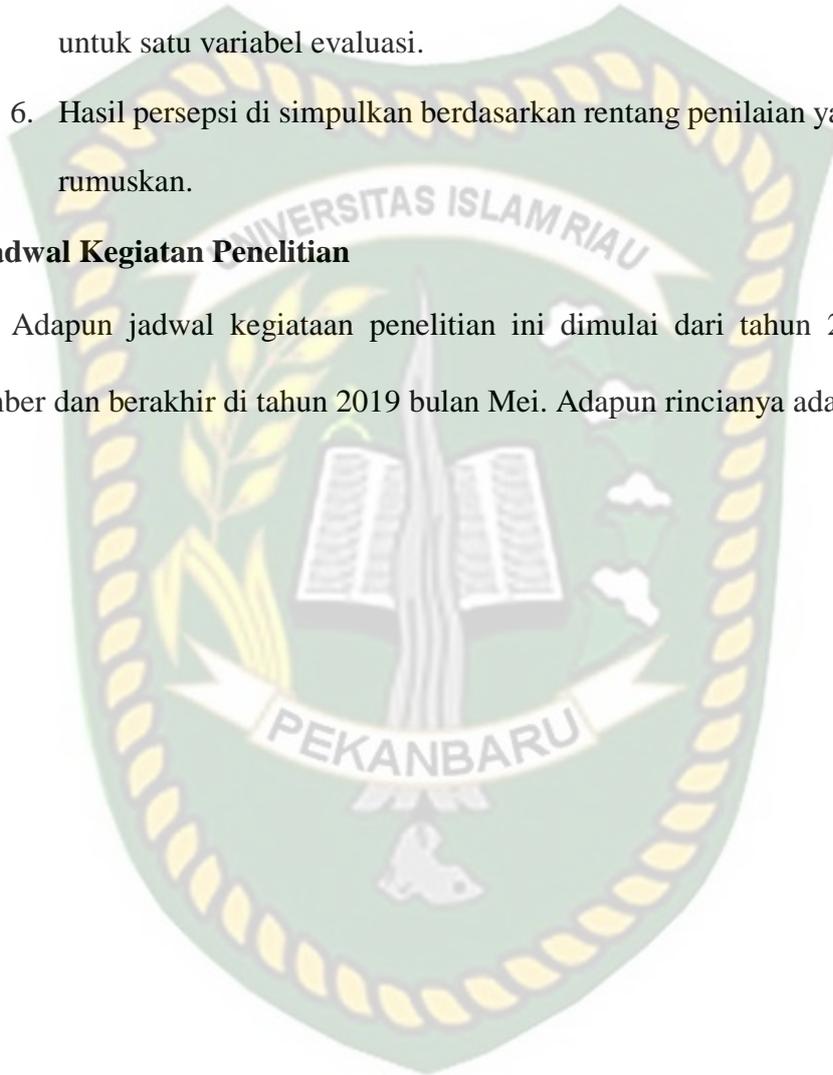
G. Teknik Analisis Data

1. Menjabarkan data numeric dari satu variabel dengan sebaran (distribusi) frekuensi dengan data tingkat ordinal.
2. Sebaran data numeric di analisis berdasarkan bobot dan jumlah responden.
3. Tope pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert, digunakan untuk menetapkan persentase persepsi dari 1 (satu) indikator.

4. Ukuran persepsi di ambil dan di analisis berdasarkan rentang pengukuran yang di rumuskan.
5. Hasil persepsi dari setiap indikator di rekapitulasi dan di tarik persentase untuk satu variabel evaluasi.
6. Hasil persepsi di simpulkan berdasarkan rentang penilaian yang telah di rumuskan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian ini dimulai dari tahun 2018 bulan Desember dan berakhir di tahun 2019 bulan Mei. Adapun rinciannya adalah



Tabel III.3 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																											
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan Proposal	■																											
2	Ujian Proposal																												
3	Revisi Proposal																												
4	Kuisisioner																												
5	Rekomendasi survay																												
6	Survay Lapangan																												
7	Analisis data																												
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																												
9	Konsultasi Revisi Skripsi																												
10	Ujian Konferehensif Skripsi																												
11	Revisi Skripsi																												
12	Pengandaan Skripsi																												

Sumber : Oalahan Penulis Tahun 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km² , yang berada pada posisi antara 0000 -1 0 00 Lintang Selatan dan 1010 02 - 1010 55 Bujur Timur.

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi
3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas – batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Jambi dan Sumatera Barat . Hal ini dapat memberikan

keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

1. Topografi

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 30 -150 diatas permukaan laut.

2. Geologi

Secara Struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan volkanik dan intrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

3. Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,60C – 36,50C dan suhu minimum berkisar antara 19,20c – 22,00C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
- b. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

4. Hidrografi

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air

bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

B. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/Kelurahan, sebagai berikut:

1. Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Kecamatan Singingi.
3. Kecamatan Kuantan Mudik.
4. Kecamatan Kuantan Hilir.
5. Kecamatan Cerenti.
6. Kecamatan Benai.

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H.Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah

pasangan Drs. H.Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001- 2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 (dua) bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) kecamatan dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah:

1. Kecamatan Hulu Kuantan.
2. Kecamatan Gunung Toar.
3. Kecamatan Singingi Hilir.
4. Kecamatan Pangean.
5. Kecamatan Logas Tanah Darat.
6. Kecamatan Inuman.

C. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi

1. Agama

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 45. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah. Kesemarakan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makin banyaknya tempat peribadatan, pembangunan tempat peribadatan yang semakin berkembang.

3. Kebudayaan

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adalah masyarakat melayu kuantan. Suku pedantang yang dominan diantaranya adalah suku Jawa yang datang ke Kabupaten Kuantan Singingi melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku Jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan.

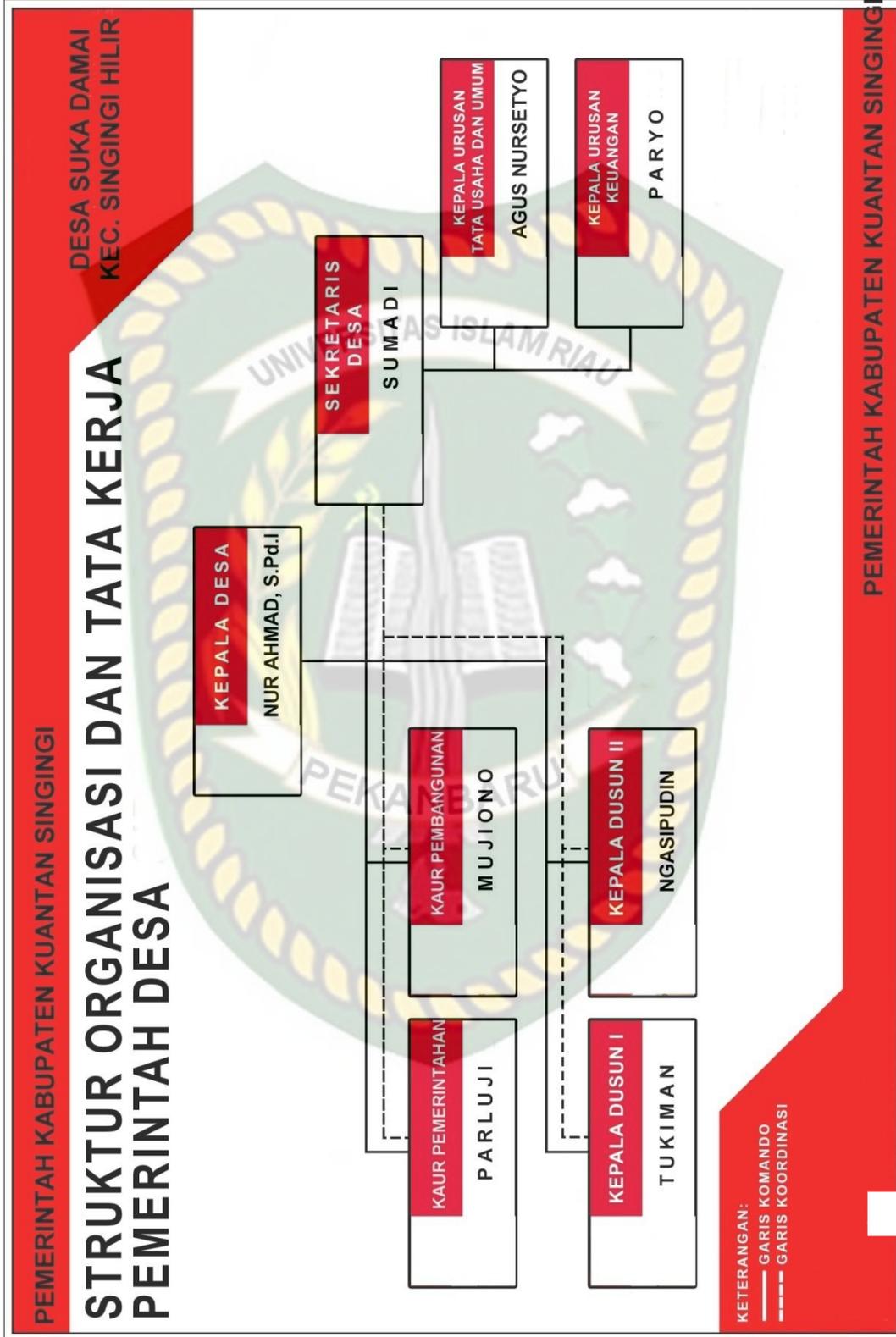
4. Pendidikan

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi dalam bidang pendidikan. Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila tidak dikelola dengan baik. Jumlah SD Negeri, SLTP Negeri, dan SLTA mengalami peningkatan yang cukup bagus, yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah (Wajib Belajar 9 Tahun). Jumlah SLTP dan SLTA Negeri mengalami banyak peningkatan demikian juga dengan jumlah muridnya.

5. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling karena ketiganya mampu menjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.

D. Struktur Organisasi Desa Suka Damai



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, jadi data-data yang di dapat penelitian ini besumber dari Masyarakat dengan cara melakukan kuesioner serta melakukan wawancara kepada pegawai Pemerintah Desa Suka Damai. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Suka Damai, Sekretaris Desa Suka Damai, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Damai, Masyarakat Desa Suka Damai.

Sehubungan denga penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Berikut ini ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas reponden:

I. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, penulis perlu mengetahui identitas masyarakat, yang dimulai dari jenis kelamin. Untuk mengetahui identitas masyarakat, penulis akan memaparkan dengan menggunakan tabel. Hal ini untuk mempermudah penulis untuk mengolah data yang telah didapatkan di lapangan. Dan untuk mengetahui

secara jelas terkait dengan identitas masyarakat, maka berikut ini adalah identitas masyarakat yang disajikan dalam bentuk tabel tersebut:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	30	53%
2	Perempuan	27	47%
Jumlah		57	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah dominannya masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 30 orang (53%) dari Total keseluruhan responden mencapai 57 Orang responden, dan jumlah responden masyarakat dengan jenis kelamin perempuan berjumlah sebanyak 27 orang dengan persentase (47%) dari total keseluruhan masyarakat.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.2: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	17	30%
2	31-40 Tahun	30	53%
3	41-50 Tahun	10	17%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		57	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.2 diatas dinyatakan bahwa responden dari masyarakat baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 31-40 Tahun sebanyak 30 orang (53%), masyarakat yang memiliki usia 20-30 Tahun sebanyak 17 orang (30%), dan yang paling minim masyarakat pada rentang 41-50 Tahun ada sebanyak 10 orang (17%). Data ini penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner pada masyarakat yang berada di Desa Suka Damai.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, serta dengan cara penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini. Penulis melakukan penelitian ini juga harus mengetahui jenjang pendidikan dari responden yang akan diteilit. Responden pada penelitian ini ada masyarakat yang ada di Desa Suka Damai, berikut hasil identitas responden pegawai dan masyarakat:

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	38	67%
4	Diploma	0	0%
5	Sarjana S1/S2	19	33%
Jumlah		57	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.3 diatas dinyatakan bahwa responden dari masyarakat baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling dominan memiliki pendidikan pada kategori “SMA” dengan jumlah responden 38 orang (67%), dan yang paling minim adalah Sarjana, yaitu sebanyak 19 orang (33%), dari jumlah total keseluruhan responden masyarakat.

B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indikator Variabel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Nampak. Perhatian yang di maksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. (Harbani Pasolong 2013 : 131). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dan indikator yang penulis gunakan adalah berdasarkan Teori William N.Dunn (2003:126) Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan

dalam mencari hasil dari penelitian ini yang adalah: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Dan di dalam setiap indikatornya akan di lengkapi dengan tiap-tiap sub indikator berjumlah sebanyak 2 Sub indikator atau item penilaian setiap indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu Efektivitas maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk Tabel dan juga analisis sebagai berikut ini:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Untuk mengetahui hasil penelitian yang berhasil penulis dapatkan untuk indikator ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

Tabel V.4: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Item Tanya Pertama “Sumber Daya Manusia Pelaksana Tugas Program Mencukupi”

No	Item Tanya Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	SDM Sudah Memenuhi Standar	7 (12%)	33 (58%)	17 (30%)	57 (100%)
2	SDM Memiliki Pengalaman Kerja	10 (18%)	38 (67%)	9 (16%)	57 (100%)
3	SDM Mencukupi	7 (12%)	31 (54%)	19 (33%)	57 (100%)

4	Diperlukan Penambahan SDM	16 (28%)	38 (67%)	3 (5%)	57 (100%)
5	SDM Memiliki Tanggung Jawab yang Tinggi	8 (14%)	39 (68%)	10 (18%)	57 (100%)
Jumlah		48	179	58	285
Rata-Rata		10	36	11	57
Persentase		18%	63%	19%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.4 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Pertama yaitu “Sumber Daya Manusia Pelaksana Tugas Program Mencukupi” memiliki 5 pertanyaan yaitu “SDM sudah memenuhi standar, SDM sudah memiliki pengalaman kerja, SDM mencukupi, Diperlukan penambahan SDM, SDM sudah memiliki tanggung jawan yang tinggi” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Optimal” yaitu sebanyak 10 orang (18%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 36 orang (63%), dan menjawab kateogori “Kurang Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 11 orang (19%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Untuk memperkuat penjelasan di atas penulis akan memaparkan data pendukung berupa data sekunder yaitu data Sumber Daya Manusia Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir, untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel V.5: Daftar Perangkat Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	2	3	4
1.	Nur Ahmad, S.Pd.I	Kepala Desa	Kepala Desa
2.	Sumadi	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa

3.	Agus Prasetyo	Kaur Umum	Kaur. Tu dan Umum
4.	Paryo	Kaur Keuangan	Kaur. Keuangan
5.	Mujiono	Kaur Pembangunan	Kasie. Kesra
6.	Parluji	Kaur Pemerintahan	Kasie. Pemerintahan
7.	Tukiman	Kadus Sumber Mulya	Kadus. Sumber Mulya
8.	Ngasipudin	Kadus Muara Jaya	Kadus. Muara Jaya
9.	Pandu Juliawan	-	Operator Siskeudes
10.	Agus P.	-	Operator SMARTDes
11.	Rizda Dwi Meilani	Staf	Staf
12.	Rizki Lestari	Staf	Staf

Sumber: Kantor Desa Suka Damai, Tahun 2019

Jadi berdasarkan penjelasan tabel dan hasil data sekunder di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia perangkat Desa Suka Damai dilihat dari jumlahnya sudah cukup memadai atau terbilang cukup optimal, jumlah sumber daya manusia tentunya sesuai dengan kebutuhan yang ada di Desa tersebut, tetapi jika dilihat dari kualitas sumber daya manusianya dapat dinilai dari hasil kinerja khususnya pada bidang infrastruktur pembangunan. Secara umum pelaksanaan pembangunan di Desa Suka Damai sudah berjalan di beberapa sektor yang menjadi prioritas Pemerintah Desa, di antaranya adalah bidang infrastruktur Desa, tetapi yang menjadi pembahasan adalah pembangunan yang dilaksanakan tersebut belum berjalan secara maksimal atau penuh, hal inilah yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini, dan erat kaitannya dengan data yang disajikan di atas.

Selanjutnya penulis akan mencoba menyajikan hasil penelitian penulis terkait dengan pembahasan pada item pertanyaan yang ke dua pada indikator yang pertama, yaitu "Ketersediaan anggaran dan kelengkapan sarana dan prasarana" untuk proses pembangunan fisik atau infrastruktur di Desa Suka Damai Kecamatan

Singingi Hilir, anggaran tentunya menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan proses pembangunan, dimana tidak akan ada pembangunan yang akan berjalan tanpa adanya proses penganggaran, dan adapun hasil penelitian untuk item tanya terkait anggaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel V.6: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Item Tanya Kedua “Ketersediaan Anggaran dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana”

No	Item Tanya Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Memiliki Anggaran	11 (12%)	35 (58%)	11 (30%)	57 (100%)
2	Memiliki Sarana dan Prasarana	6 (18%)	44 (67%)	7 (16%)	57 (100%)
3	Sosialisasi Jumlah Anggaran	7 (12%)	31 (54%)	19 (33%)	57 (100%)
4	Kecukupan Anggaran Desa	16 (28%)	38 (67%)	3 (5%)	57 (100%)
5	Anggaran Sesuai Dengan Kualitas Pembangunan	8 (14%)	39 (68%)	10 (18%)	57 (100%)
6	Transparansi Jumlah Anggaran	18 (31%)	17 (30%)	22 (39%)	57 (100%)
Jumlah		66	204	72	342
Rata-Rata		11	34	12	57
Persentase		19%	60%	21%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.6 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Pertama yaitu “Ketersediaan Anggaran dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana” memiliki 6 pertanyaan yaitu “Memiliki Anggaran, Memiliki Sarana dan Prasarana, Pemerintahan Desa Pernah Memberikan Informasi Jumlah Alokasi Dana, Anggaran

yang Tersedia Sudah Mencukupi, Anggaran Sudah Sesuai dengan Program Pembangunan, Pemerintahan Desa Memberikan Informasi Anggaran Untuk Pembangunan Desa” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Optimal” yaitu sebanyak 11 orang (19%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 34 orang (60%), dan menjawab kateogori “Kurang Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 12 orang (21%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Berdasarkan tabel dari hasil penulis sebarakan kepada masyarakat Desa Suka Damai sebagai responden dalam penelitian ini dapat disimpulkan jawaban yang paling dominan adalah pada kategori cukup optimal, hal ini dikarnakan bahwa masyarakat menilai bahwa kinerja dari aparaturnya Desa Suka Damai dalam melaksanakan beberapa infrastruktur pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan, seperti semenisasi jalan, pembangunan kesehatan, serta pembangunan lainnya, tetapi pembangunan tersebut belum dilaksanakan secara merata.

Pada pelaksanaan pembangunan yang menjadi faktor utamanya selain memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai dan berkualitas, anggaran yang cukup juga termasuk faktor utama dalam keberhasilan realisasi pembangunan khususnya pada pembangunan Desa Suka Damai. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kantor Desa Suka Damai, bahwa Desa Suka Damai memiliki anggaran pembangunan Desa Tahun 2018 berjumlah Rp. 699.089.000, dengan rincian kegiatannya adalah pembangunan semenisasi sepanjang 831 meter, dan penyertaan Modal BUMDes, agar lebih jelasnya, penulis akan paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel V.7: Jumlah Anggaran Pembangunan Desa Tahun 2018

No.	Rincian Pembangunan	Jumlah Anggaran
1.	Pembangunan Semenisasi Sepanjang 831 meter	599.089.000
2.	Penyertaan Modal BUMDes	100.000.000
Jumlah		699.089.000

Sumber: Di ambil di kantor Desa Suka Damai, Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari secara keseluruhan total anggaran pembangunan yaitu sebesar Rp. 699.089.000, tidak semua anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan, tetapi juga ditujukan kepada bidang peningkatan perekonomian yaitu modal BUMDes, hal ini tentunya peruntukkan anggaran kurang tepat dan tidak sesuai dengan perencanaan rincian anggaran yang sudah disetujui oleh pemerintahan pusat.

Untuk selanjutnya penulis akan memaparkan rekapitulasi hasil dari indikator pertama yaitu sebagai berikut:

Tabel V.8: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Yang Pertama Yaitu “Efektivitas”

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	SDM Pelaksana Tugas Program Mencukupi.	10 (18%)	36 (63%)	11 (19%)	57 (100%)
2	Ketersediaan Anggaran Serta Sarana dan Prasarana.	11 (19%)	34 (60%)	12 (21%)	57 (100%)
Jumlah		21	70	23	114
Rata-Rata		10	35	12	57
Persentase		18%	61%	21%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.8 di atas dapat dilihat bahwa indikator Ke dua yaitu “Efektivitas” memiliki dua sub indikator yaitu “Sumber Daya Manusia Pelaksana Tugas Program Mencukupi, Ketersediaan Anggaran dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata rata “Optimal” yaitu sebanyak 10 orang (18%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” sebanyak 35 orang (61%), dan pada kategori “Kurang Optimal” rata-rata responden memberikan tanggapan sebanyak 12 orang (21%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Setelah ditemukan hasil penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner dilapangan yang mana respondennya adalah masyarakat Desa Suka Damai, maka penulis akan melengkapi hasil penelitian tersebut dengan menyajikan hasil wawancara dengan informan peelitian yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik di Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir, dimana informan penulis adalah Kepala Desa Suka Damai yaitu Bapak Nur Ahmad, dan Sekretaris Desa Suka Damai yaitu Bapak Sumadi, dan informan yang mewakili pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bapak Ngasifudin.

Adapun hasil wawancara yang penulis sajikan dibawah ini tentunya berkaitan langsung dengan pembahasan indikator diatas, dimana setiap item tanya yang ada pada indikator akan dibuat hasil wawancaranya, dan wawancara yang pertama adalah dengan Kepala Desa Suka Damai yaitu Bapak, Nur Ahmad, dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Untuk SDM yang melakukan tugas pengawasan tentunya mencukupi, karna kan secara administrasi, bukan pegawai Desa yang turun

langsung untuk bekerja, tetapi sistemnya kerja sama dengan masyarakat dan beberapa pekerja yang memang dibayar untuk melakukan kegiatan kerja yang masyarakat tidak bisa, contohnya saja pembuatan Box Culvert atau pembuatan jembatan, tidak semua masyarakat desa memahami teorinya, jadi kita melakukan sistem kontrak dengan pemborong untuk melakukan pekerjaan itu, takutnya kalau di coba-coba, dampaknya justru berbahaya” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk.Nur Ahmad, Kepala Desa Suka Damai)

Sementara untuk tanggapan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Suka Damai yaitu Bapak Sumadi, terkait dengan pertanyaan penulis yang berkaitan dengan pembahasan pada masing-masing item tanya yang ada pada indikator diatas dapat di lihat pada penyajian hasil wawancara dibawah ini:

“Anggaran tersedia, tetapi tidak banyak, kita harus pandai memilih mana yang harus diprioritaskan untuk dibangun, semua pembangunan ada analisis kerjanya, ada yang di proyeksikan untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, jadi anggaran yang sedikit tadi kita bagi-bagi dan kita atur sedemikian rupa agar semua terpenuhi, karna kalau berharap anggaran dari pusat, yang ada kita tidak akan ada pembangunan, karna anggaran itu seringkali menjadi anggaran terutang, program ada uangnya tidak ada dikarenakan tidak dicairkan oleh pusat” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk. Sumadi, Sekretaris Desa Suka Damai)

Untuk melengkapi hasil wawancara diatas, penulis juga telah melakukan wawancara dengan perwakilan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Damai yaitu Bapak Ngasifudin, dan adapun jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis yang berhubungan dengan pembahasan pada indikator diatas adalah sebagai berikut ini:

“Dari laporan yang kita ketahui, anggaran untuk pembangunan Desa memang tersedia, Cuma dalam prosesnya kita tidak tau proyeksinya itu di rancang untuk bagian yang mana dulu, karna pembangunan kan tidak bisa dilakukan secara serentak, anggaran tadi tidak mungkin cukup untuk itu, dan tugas kita selaku BPD untuk melakukan pemantauan terhadap prosesnya kedepan nanti” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk.Ngasifudin, Anggota BPD Desa Suka Damai)

Langkah terakhir yang penulis lakukan dalam penyempurnaan hasil penelitian pada indikator ini adalah dengan melakukan observasi langsung kelapangan, dimana dilapangan penulis menemukan fakta bahwa pembangunan fisik di Desa Suka Damai memang bisa dikatakan berjalan cukup lambat, hal ini di akui oleh Pemerintah Desa yang mengatakan adanya keterbatasan anggaran dalam proses pembangunan tersebut, dan dikaitkan dengan jumlah Sumber Daya Manusia di Kantor Desa Suka Damai, untuk melaksanakan proses pembangunan, jumlah tersebut sudah mencukupi jumlahnya, karna dalam pelaksanaannya, pembangunan dilakukan secara bersama sama dengan masyarakat, ini untuk pembangunan hal kecil seperti semenisasi jalan, tetapi untuk pembangunan yang memerlukan keahlian khusus, Desa cenderung menyewa atau kontrak dengan pihak swasta yang ahli di bidang pekerjaan tersebut.

2. Efisiensi

Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkosnya. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Selain persoalan mengenai ongkos dari pengadaan pembangunan, tetapi efisiensi juga sangat erat dengan waktu pengerjaan pembangunan yang sedang dilaksanakan yaitu sesuai dengan waktu yang targetkan pada perencanaan pembangunan sebelumnya. Untuk mengetahui hasil penelitian yang berhasil penulis dapatkan untuk indikator ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

Tabel V.9: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Item Tanya pertama “Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai dengan Waktu yang Telah Ditentukan”

No	Item Tanya Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Pembangunan Selesai Tepat Waktu	10 (18%)	35 (61%)	12 (21%)	57 (100%)
2	Laporan Rincian Biaya Pembangunan	10 (18%)	38 (67%)	9 (16%)	57 (100%)
Jumlah		20	73	21	114
Rata-Rata		10	37	10	57
Persentase		18%	65%	18%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.9 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Pertama yaitu “Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai dengan Waktu yang Telah Ditentukan” memiliki 2 pertanyaan yaitu “Program Pembangunan Sesuai dengan Waktu yang Telah Ditentukan, Adanya Rincian Biaya dalam Pelaksanaan Pembangunan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Optimal” yaitu sebanyak 10 orang (18%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 37 orang (65%), dan menjawab kateogori “Kurang Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 10 orang (18%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Berdasarkan hasil tabel di atas yaitu berkenaan dengan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat dominan memberikan jawaban pada kategori cukup optimal, hal ini

dikarnakan bahwa masyarakat memberikan penilaian terhadap beberapa pembangunan yang dilaksanakan belum selesai sesuai dengan yang sudah ditentukan, yang mana penulis memiliki data sekunder yaitu berupa dokumentasi pembangunan yang seharusnya pembangunan tersebut selesai dalam jangka waktu 90 hari, tetapi pada kenyataannya hingga saat sekarang pembangunan tersebut belum selesai. Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan foto dokumentasi semenisasi jalan, yaitu sebagai berikut:

Gambar V.1: Pembangunan Semenisasi Jalan Pada Desa Suka Damai



Sumber: Kantor Desa Suka Damai, Tahun 2019

Gambar di atas merupakan salah satu pembangunan yang menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2018 yaitu semenisasi jalan di sekitar wilayah Desa Suka Damai. Di dalam rincian anggaran pembangunan, selain tertera jumlah anggaran dan pembangunan yang akan dilaksanakan, tetapi waktu pengerjaan juga ada di dalam rincian anggaran tersebut. Tidak hanya pada rincian anggaran, target waktu pengerjaan juga ada pada papan informasi pembangunan

sesuai dengan yang tercantum pada gambar di atas, bahwa khusus untuk pembangunan semenisasi jalan target pengerjaannya selama 90 hari. Tetapi pada realiasinya pengerjaan pembangunan semenisasi jalan belum selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Tabel V.10: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Item Tanya Kedua Yaitu “Penyediaan Bahan-Bahan Material sesuai dengan Bangunan yang Akan Dilaksanakan”

No	Item Tanya Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Penyediaan Bahan Material	0 (0%)	21 (37%)	36 (63%)	57 (100%)
2	Bahan Material Memiliki Kualitas Yang Baik	6 (18%)	44 (67%)	7 (16%)	57 (100%)
Jumlah		6	65	43	114
Rata-Rata		3	32	22	57
Persentase		5%	56%	39%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.10 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Ke dua yaitu “Penyediaan Bahan-Bahan Material sesuai dengan Bangunan yang akan Dilaksanakan” memiliki 2 pertanyaan yaitu “Penyediaan Bahan Material, Bahan Material memiliki Kualitas yang Baik” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Optimal” yaitu sebanyak 3 orang (5%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 32 orang (56%), dan menjawab kateogori “Kurang Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 22 orang (39%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Dilihat dari hasil tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam penyediaan bahan-bahan material yang dilakukan oleh aparatur Desa sudah cukup optimal. Hal ini dapat dinilai cukup optimal dikarenakan dari ke dua item yang tertera di atas, ada satu item masyarakat lebih dominan menilai kurang optimal yaitu pada penyediaan bahan material untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Suka Damai.

Tabel V.11: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Yang Kedua Yaitu “Efisiensi”

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Pelaksanaan Program Pembangunan Sesuai dengan Waktu yang Telah Ditentukan	10 (18%)	37 (64%)	10 (18%)	57 (100%)
2	Penyediaan Bahan-Bahan Material Sesuai dengan Bangunan yang Akan Dilaksanakan	3 (5%)	32 (56%)	22 (39%)	57 (100%)
Jumlah		13	69	32	114
Rata-Rata		7	34	16	57
Persentase		12%	60%	28%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.11 di atas dapat dilihat bahwa indikator Ke dua yaitu “Efisiensi” memiliki dua sub indikator yaitu “Pembangunan Sesuai dengan Waktu yang Telah Ditentukan, Penyediaan Bahan-Bahan Material dengan Bangunan yang akan Dilaksanakan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata rata “Optimal” yaitu sebanyak 7 orang (12%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” sebanyak 34 orang (60%), dan pada kategori “Kurang Optimal” rata-rata

responden memberikan tanggapan sebanyak 16 orang (28%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Setelah ditemukan hasil penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner dilapangan yang mana respondennya adalah masyarakat Desa Suka Damai, maka penulis akan melengkapi hasil penelitian tersebut dengan menyajikan hasil wawancara dengan informan penelitian yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik di Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir, dimana informan penulis adalah Kepala Desa Suka Damai yaitu Bapak Nur Ahmad, dan Sekretaris Desa Suka Damai yaitu Bapak Sumadi, dan informan yang mewakili pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bapak Ngasifudin.

Adapun hasil wawancara yang penulis sajikan dibawah ini tentunya berkaitan langsung dengan pembahasan indikator diatas, dimana setiap item tanya yang ada pada indikator akan dibuat hasil wawancaranya, dan wawancara yang pertama adalah dengan Kepala Desa Suka Damai yaitu Bapak, Nur Ahmad, dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Proses pembangunan dilapangan memang biasanya akan ada beberapa waktu perbedaan dengan prediksi target, hal ini biasanya dipengaruhi oleh cuaca, atau mungkin anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan prediksi, sehingga berdampak kepada proses pembanguan yang tertunda” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk.Nur Ahmad, Kepala Desa Suka Damai)

Sementara untuk tanggapan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Suka Damai yaitu Bapak Sumadi, terkait dengan pertanyaan penulis yang berkaitan dengan pembahasan pada masing-masing item tanya yang ada pada indikator diatas dapat di lihat pada penyajian hasil wawancara dibawah ini:

“Bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembangunan tentunya disediakan terlebih dahulu, tetapi sistem dalam penyediaan bahan material ini sifatnya bertahap, sebelum bangunan itu dilakukan atau di awal, dan setelah proses pembangunan sudah berjalan nantinya, jadi saya rasa untuk material-material yang dibutuhkan itu sudah dipersiapkan, contoh saja dalam pembangunan semenisasi jalan kampung, maka sebelum proses dilakukan, kita sudah membeli batu dan pasirnya terlebih dahulu, baru nantinya di kerjakan secara gotong royong dengan masyarakat, ini untuk jalan-jalan gang di kampung, sementara untuk jalan besar, kita sistemnya sewa alat” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk.Sumadi, Sekretaris Desa Suka Damai)

Untuk melengkapi hasil wawancara diatas, penulis juga telah melakukan wawancara dengan perwakilan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Damai yaitu Bapak Ngasifudin, dan adapun jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis yang berhubungan dengan pembahasan pada indikator diatas adalah sebagai berikut ini:

“Tugas kitakan itu melakukan pengawasan tugas kepala Desa dan menyampaikan keluhan atau aspirasi dari masyarakat, apabila pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan rencana, maka kita tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang bersifat kritisi, ini tidak sericuh yang ada di kota-kota sana, kita di sini sifatnya kekeluargaan, semua dirundingkan dengan musyawarah, dan selama ini masyarakat selalu mendapat tempat untuk membahas permasalahan di Desa Suka Damai, dan disitulah peran kita sebagai BPD” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk.Ngasifudin, Anggota BPD Desa Suka Damai)

Langkah terakhir yang penulis lakukan dalam penyempurnaan hasil penelitian pada indikator ini adalah dengan melakukan observasi langsung kelapangan, dimana dilapangan penulis menemukan fakta bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan beberapa pembangunan fisik lainnya memang mengalami keterlambatan penyelesaian, hal ini di akui oleh pemerintah Desa Suka Damai yang mengatakan faktor penghambat dari permasalahan pembangunan tersebut adalah pendanaan yang sifatnya diberikan secara bertahap, tetapi ketika pendanaan di nantikan di tahap berikutnya, maka hal ini yang sering menjadi permasalahan secara umum karna tidak segera dapat di cairkan dana nya.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Untuk mengetahui hasil penelitian yang berhasil penulis dapatkan untuk indikator ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

Tabel V.12: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Item Tanya Pertama Yaitu “Program yang Disusun Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat”

No	Item Tanya Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Program Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan	2 (4%)	45 (79%)	10 (18%)	57 (100%)
2	Pemerintah Desa Meminta Pendapat Masyarakat	0 (0%)	22 (39%)	35 (61%)	57 (100%)
3	Masyarakat Ikut Serta Dalam Pengawasan	10 (18%)	35 (61%)	12 (21%)	57 (100%)
4	Bangunan Memiliki Kualitas Yang Baik	10 (18%)	38 (67%)	9 (16%)	57 (100%)
5	Pembangunan Tidak Sesuai Program	0 (0%)	15 (26%)	42 (74%)	57 (100%)
Jumlah		22	155	108	285
Rata-Rata		4	31	22	57
Persentase		7%	54%	39%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.12 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Pertama yaitu “Program yang Disusun Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat” memiliki 5 pertanyaan yaitu “Program sudah sesuai dengan kebutuhan pembangunan, Pemerintah Desa meminta pendapatan masyarakat, Masyarakat ikut serta dalam pengawasan, Bangunan memiliki kualitas yang baik, Pembangunan yang terlaksana tidak sesuai program” dapat diperoleh hasil tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Optimal” yaitu sebanyak 4 orang (7%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 31 orang (54%), dan menjawab kategori “Kurang Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 22 orang (39%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Berdasarkan dari hasil kuesioner yang dipaparkan menggunakan tabel di atas dapat diperoleh bahwa masyarakat lebih dominan menjawab pada kategori cukup optimal dalam penilaian terkait “program yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat”, hal ini dikarenakan bahwa program yang disusun oleh pihak aparaturnya Desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena aparaturnya Desa meminta pendapat masyarakat melalui forum sosialisasi pembangunan yang akan dilaksanakan. Di dalam pertemuan sosialisasi masyarakat diminta untuk menyalurkan apresiasinya terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat menunjang perekonomian serta kemajuan masyarakat dan Desa itu sendiri.

Walaupun perencanaan pembangunan sudah ditetapkan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat serta sesuai dengan apresiasi masyarakat, yang menjadi permasalahannya adalah pada pelaksanaannya di lapangan yaitu perkembangan pembangunan yang lambat hal ini yang dibutuhkan adalah keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi proses pembangunan di lapangan.

Tabel V.13: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Item Tanya Kedua Yaitu “Perencanaan Anggaran yang Sesuai dengan Kebutuhan Program”

No	Item Tanya Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Masyarakat Mengetahui Jumlah Anggaran	0 (0%)	21 (37%)	36 (63%)	57 (100%)
2	Pelaksanaan Sosialisasi Program Desa.	6 (18%)	44 (67%)	7 (16%)	57 (100%)
3	Kontraktor Memasang Papan Izin Pembangunan	10 (18%)	38 (67%)	9 (16%)	57 (100%)
4	Kualitas Pembangunan Sesuai Jumlah Anggaran	0 (0%)	15 (26%)	42 (74%)	57 (100%)
Jumlah		16	118	94	228
Rata-Rata		4	30	23	57
Persentase		7%	53%	40%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.13 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Ke dua yaitu “Perencanaan Anggaran yang Sesuai dengan Kebutuhan Program” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Masyarakat mengetahui jumlah anggaran, Pemerintah Desa melakukan sosialisasi tentang program desa, Kontraktor memasang papan izin pembangunan, Kualitas pembangunan sesuai dengan jumlah anggaran” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Optimal” yaitu sebanyak 4 orang (7%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 30 orang (53%), dan menjawab kateogori “Kurang Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 23 orang (40%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperoleh hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada masyarakat, bahwa masyarakat dominan memberikan penilaian cukup optimal terkait “Perencanaan Anggaran yang Sesuai dengan Kebutuhan Program”, hal ini dikarenakan di dalam perencanaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan aparatur Desa mengkaji terlebih dahulu atau melakukan observasi ke lapangan, setelah itu pihak Pemerintahan Desa meminta pendapat masyarakat melalui kegiatan sosialisasi perencanaan pembangunan terkait pembangunan yang direncanakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar pembangunan yang pemerintah laksanakan tidak bernilai sia-sia dihadapan masyarakat.

Untuk melengkapi penjelasan di atas penulis akan memaparkan bukti berupa data dokumentasi terkait kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh aparatur Desa Suka Damai, hal ini tentunya penulis dapatkan dari kantor Desa Suka Damai itu sendiri untuk dijadikan data sekunder penulis, yang berguna untuk melengkapi data data yang penulis dapatkan dari kuesioner dan wawancara sebelumnya. Untuk lebih jelasnya berikut foto dokumentasi kegiatan sosialisasi:

Gambar V.2: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pembangunan yang Dilakukan Pihak Desa Suka Damai



Sumber: Kantor Desa Suka Damai, Tahun 2019

Gambar V.3: Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pembangunan yang Dilakukan Pihak Desa Suka Damai



Sumber: Kantor Desa Suka Damai, Tahun 2019

Selain itu penulis juga memiliki data sekunder berupa foto dokumentasi sebagai bukti bahwa kontraktor memasang papan izin pembangunan, yang berisikan informasi perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, jumlah anggaran, sumber dana, dan waktu penyelesaian pembangunan yang dilaksanakan.

Gambar V.4: Dokumentasi Papan Izin Pembangunan



Sumber: Kantor Desa Suka Damai, Tahun 2019.

Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil rekapitulasi terkait indikator ke tiga yaitu tentang “Kecukupan” yang terdiri dari dua item yaitu Program yang

Disusun Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat, dan Perencanaan Anggaran yang Sesuai Dengan Kebutuhan Program, sebagai berikut:

Tabel V.14: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Penelitian Pada Indikator Ketiga “Kecukupan”

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Program Yang Disusun Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat	4 (7%)	31 (54%)	22 (39%)	57 (100%)
2	Perencanaan Anggaran Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Program	4 (7%)	30 (53%)	23 (40%)	57 (100%)
Jumlah		8	61	45	114
Rata-Rata		4	31	22	57
Persentase		7%	54%	39%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.14 di atas dapat dilihat bahwa indikator Ke tiga yaitu “Kecukupan” memiliki dua sub indikator yaitu “Program yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan Perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan program” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata rata “Optimal” yaitu sebanyak 4 orang (7%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” sebanyak 31 orang (54%), dan pada kategori “Kurang Optimal” rata-rata responden memberikan tanggapan sebanyak 22 orang (39%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Setelah ditemukan hasil penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner dilapangan yang mana respondennya adalah masyarakat Desa Suka Damai, maka

penulis akan melengkapi hasil penelitian tersebut dengan menyajikan hasil wawancara dengan informan penelitian yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik di Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir, dimana informan penulis adalah Kepala Desa Suka Damai yaitu Bapak Nur Ahmad, dan Sekretaris Desa Suka Damai yaitu Bapak Sumadi, dan informan yang mewakili pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bapak Ngasifudin.

Adapun hasil wawancara yang penulis sajikan dibawah ini tentunya berkaitan langsung dengan pembahasan indikator diatas, dimana setiap item tanya yang ada pada indikator akan dibuat hasil wawancaranya, dan wawancara yang pertama adalah dengan Kepala Desa Suka Damai yaitu Bapak, Nur Ahmad, dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Tentu saja, program ini dibuat dengan melibatkan masyarakat juga, aspirasi masyarakat kita tampung melalui BPD, apa saja isu-isu yang ada di masyarakat, kita masukin ke dalam pembahasan, dan setelah semuanya di bahas dan ditemukan solusinya, barulah kita eksekusi dilapangan dalam bentuk pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat tadi” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk.Nur Ahmad, Kepala Desa Suka Damai)

Sementara untuk tanggapan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Suka Damai yaitu Bapak Sumadi, terkait dengan pertanyaan penulis yang berkaitan dengan pembahasan pada masing-masing item tanya yang ada pada indikator diatas dapat di lihat pada penyajian hasil wawancara dibawah ini:

“Program ini dibuatkan berdasarkan masukan-masukan dan musyawarah di Desa, melibatkan banyak pihak dan masyarakat juga, jadi saya rasa, apapun yang di anggarkan terhadap proses pembangunan yang sudah di programkan, itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk.Sumadi, Sekretaris Desa Suka Damai)

Untuk melengkapi hasil wawancara diatas, penulis juga telah melakukan wawancara dengan perwakilan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Damai yaitu Bapak Ngasifudin, dan adapun jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis yang berhubungan dengan pembahasan pada indikator diatas adalah sebagai berikut ini:

“Sudah, saya rasa sudah sesuai dengan kebutuhan yang di inginkan masyarakat, karna program pembangunan yang ada kan melalui mekanisme sosialisasi dan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat, sehingga semua proses yang dilaksanakan saat ini, merupakan hasil dari kesepakatan sesama” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk.Ngasifudin, Anggota BPD Desa Suka Damai)

Langkah terakhir yang penulis lakukan dalam penyempurnaan hasil penelitian pada indikator ini adalah dengan melakukan observasi langsung kelapangan, dimana dilapangan penulis menemukan fakta pelaksanaan sosialisasi program dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan program memang dilakukan, tetapi tidak semua masyarakat, hanya perwakilan saja, dan beberapa masyarakat mengakui bahwa proses pelaksanaan program memang sudah sesuai dengan kebutuhan, seperti semenisasi jalan kampung yang sudah rusak dan rencana pengadaan sumur bor umum di perkampungan, tetapi prosesnya masih belum dilaksanakan khususnya untuk subur bor, dan untuk semenisasi jalan kampung atau gang kampung, sampai saat ini masih dalam tahap pelaksanaan, dan belum semua jalan kampung yang sudah di lakukan semenisasi.

4. Pemerataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan

mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran. Untuk mengetahui hasil penelitian yang berhasil penulis dapatkan untuk indikator ini, maka penulis akan menyajikannya pada tabel dibawah ini:

Tabel V.15: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Item Tanya Pertama Yaitu “Pembangunan yang Adil dan Merata Di Setiap Daerah dalam Desa”

No	Item Tanya Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Pembangunan Sudah Merata	12 (21%)	35 (62%)	10 (18%)	57 (100%)
2	Pembangunan Yang Adil	7 (12%)	43 (76%)	7 (12%)	57 (100%)
3	Pembangunan Telah Selesai dan Sesuai Kebutuhan	17 (30%)	28 (49%)	12 (21%)	57 (100%)
4	Ada Pembangunan Yang Belum Diperhatikan	10 (18%)	38 (67%)	9 (16%)	57 (100%)
Jumlah		46	144	38	228
Rata-Rata		12	36	9	57
Persentase		21%	63%	16%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.15 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Pertama yaitu “Pembangunan yang adil dan merata disetiap daerah dalam desa” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Pembangunan sudah merata di setiap desa, pembangunan yang adil, Pembangunan yang telah selesai sesuai dengan kebutuhan masyarajat, Pembangunan yang belum diperhatikan oleh Pemerintah Desa” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Optimal” yaitu sebanyak 12 orang (21%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal”

dapat diperoleh hasil rata-rata 36 orang (63%), dan menjawab kategori “Kurang Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 9 orang (16%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait “pembangunan yang adil dan merata disetiap daerah dalam desa” dapat disimpulkan cukup optimal dalam pelaksanaannya di lapangan. Dikategorikan cukup optimal karna pembangunan yang direncanakan sudah dilaksanakan, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam realisasinya di lapangan seperti belum meratanya pembangunan semenisasi jalan dan pembangunan drainase pada Desa Suka Damai tersebut.

Tabel V.16: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Item Tanya Kedua Yaitu “Jumlah Anggaran Tidak Berbeda dengan Pembangunan yang Sama”.

No	Item Tanya Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Pembangunan Memiliki Nilai Yang Sama dengan anggaran.	0 (0%)	45 (79%)	12 (21%)	57 (100%)
2	Pemerintah Desa Transparansi	15 (26%)	25 (44%)	17 (30%)	57 (100%)
3	Mengalami Permasalahan Terkait Keuangan.	18 (32%)	33 (58%)	6 (11%)	57 (100%)
4	Pembangunan Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak.	0 (0%)	15 (26%)	42 (74%)	57 (100%)
5	Pembangunan Dilakukan Dengan Disamaratakan Tanpa Disurvey	2 (4%)	25 (44%)	30 (53%)	57 (100%)
Jumlah		35	143	107	285
Rata-Rata		7	29	21	57
Persentase		12%	51%	37%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.16 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Ke dua yaitu “Jumlah anggaran tidak berbeda dengan pembangunan yang sama” memiliki 5 pertanyaan yaitu “Pembangunan yang dilakukan memiliki nilai yang sama, Pemerintah Desa transparansi, Mengalami permasalahan terkait keuangan, Dengan adanya pembangunan, maka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, Pembangunan dilakukan dengan disamaratakan tanpa disurvei” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Optimal” yaitu sebanyak 7 orang (12%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 29 orang (51%), dan menjawab kateogori “Kurang Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 21 orang (37%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan dari masyarakat sesuai dengan penjelasan di atas bahwa dapat disimpulkan masyarakat dominan menjawab cukup optimal, hal ini dikarnakan dari beberapa masyarakat menyatakan pembangunan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan, tetapi untuk transparansinya masih tergolong kurang baik, karna ada beberapa proses pembangunan yang tidak terdapat papan informasi. Papan informasi ini merupakan salah satu bentuk transparansi dari pihak aparaturnya Desa Suka Damai kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masyarakat mengetahui pembangunan apa yang sedang dilaksanakan dan berapa anggaran yang digunakan dalam pembangunan tersebut.

Untuk melngkapi pernyataan di atas penulis akan memaparkan data sekunder berupa dokumentasi proses pembangunan drainase atau saluran air yang tidak terdapat papan informasi, yaitu sebagai berikut:

Gambar V.5: Dokumentasi Proses Pembangunan Drainase yang Tidak Ada Papan Informasi Anggaran



Sumber: Kantor Desa Suka Damai

Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil rekapitulasi terkait indikator ke empat yaitu tentang “Pemerataan” yang terdiri dari dua item yaitu Pembangunan Yang Adil Dan Merata Disetiap Daerah Dalam Desa, dan Jumlah Anggaran Tidak Berbeda Dengan Pembangunan Yang Sama, sebagai berikut:

Tabel V.17: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Ke Empat “Pemerataan”

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Pembangunan Yang Adil Dan Merata Disetiap Daerah Dalam Desa	12 (21%)	36 (63%)	9 (16%)	57 (100%)
2	Jumlah Anggaran Tidak Berbeda Dengan Pembangunan Yang Sama	7 (12%)	29 (51%)	21 (37%)	57 (100%)
Jumlah		19	65	30	114
Rata-Rata		9	33	15	57
Persentase		16%	58%	26%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.17 di atas dapat dilihat bahwa indikator Ke empat yaitu “Pemerataan” memiliki dua sub indikator yaitu “Pembangunan yang adil dan merata disetiap daerah dalam desa, dan Jumlah anggaran tidak berbeda dengan pembangunan yang sama” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata rata “Optimal” yaitu sebanyak 9 orang (16%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” sebanyak 33 orang (58%), dan pada kategori “Kurang Optimal” rata-rata responden memberikan tanggapan sebanyak 15 orang (26%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Setelah ditemukan hasil penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner dilapangan yang mana respondennya adalah masyarakat Desa Suka Damai, maka penulis akan melengkapi hasil penelitian tersebut dengan menyajikan hasil wawancara dengan informan peelitian yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik di Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir, dimana informan penulis adalah Kepala Desa Suka Damai yaitu Bapak Nur Ahmad, dan Sekretaris Desa Suka Damai yaitu Bapak Sumadi, dan informan yang mewakili pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bapak Ngasifudin.

Adapun hasil wawancara yang penulis sajikan dibawah ini tentunya berkaitan langsung dengan pembahasan indikator diatas, dimana setiap item tanya yang ada pada indikator akan dibuat hasil wawancaranya, dan wawancara yang pertama adalah dengan Kepala Desa Suka Damai yaitu Bapak, Nur Ahmad, dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Pembangunan yang adil ini seperti apa dulu, kalau ukurannya semua jalan di semenisasi, semua RT harus ada pos kamling, harus ada mushola, maka itu semua bisa di wujudkan, tetapi tidak dengan sekaligus pembangunan secara bersamaan, harus bertahap, karna itu membutuhkan dana yang sangat besar, sementara kita memiliki

anggaran terbatas, jadi kita lakukan pembangunan bertahap dan kedepannya semua dapat dijangkau dan bisa dilakukan adil-adil nya untuk kepentingan masyarakat Desa Suka Damai ” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk.Nur Ahmad, Kepala Desa Suka Damai)

Sementara untuk tanggapan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Suka Damai yaitu Bapak Sumadi, terkait dengan pertanyaan penulis yang berkaitan dengan pembahasan pada masing-masing item tanya yang ada pada indikator diatas dapat di lihat pada penyajian hasil wawancara dibawah ini:

“Perhitungan jumlah anggaran yang ada pada program pembangunan itu kan sudah melalui riset terlebih dahulu, berapa harga bahan, berapa estimasi biaya tukang, berapa estimasi konsumsi apabila itu dilakukan gotong royong dengan masyarakat, semuanya sudah di perhitungkan, jadi tidak bisa hanya di pandang dari harga barang material saja, dan sejauh ini pembangunan yang dilakukan masih dalam tahap wajar dan transparan karna data lengkap” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk.Sumadi, Sekretaris Desa Suka Damai)

Untuk melengkapi hasil wawancara diatas, penulis juga telah melakukan wawancara dengan perwakilan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Damai yaitu Bapak Ngasifudin, dan adapun jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis yang berhubungan dengan pembahasan pada indikator diatas adalah sebagai berikut ini:

“BPD selalu melakukan evaluasi terhadap hasil dari kebijakan Kepala Desa, dan memang, walaupun sejauh ini belum seluruh Desa Suka Damai terjangkau oleh pembangunan yang bersifat skala kecil, tetapi prosesnya masih tetap berjalan, jadi kita belum bisa melakukan apa-apa, dan kita masih menunggu sampai pembangunan insfrastruktur itu selesai dilakukan oleh mereka” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk.Ngasifudin, Anggota BPD Desa Suka Damai)

Langkah terakhir yang penulis lakukan dalam penyempurnaan hasil penelitian pada indikator ini adalah dengan melakukan observasi langsung kelapangan, dimana dilapangan penulis menemukan fakta bahwa pembangunan insfrastruktur jalan desa dan jalan gang desa memang belum sepenuhnya terpenuhi

dan belum menjangkau seluruh lokasi Desa, tetapi beberapa titik sudah dilakukan tahap pembangunan dan di targetkan bahwa pembangunan tersebut akan terus dilakukan sampai seluruh Desa dapat merasakan manfaatnya.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan. Untuk mengetahui hasil penelitian yang berhasil penulis dapatkan untuk indikator ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

Tabel V.18: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Item Tanya Pertama “Melibatkan Masyarakat dalam Proses Pengawasan Terhadap Pembangunan”

No	Item Tanya Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Melibatkan Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	15 (26%)	38 (67%)	4 (7%)	57 (100%)
2	Penyuluhan Dari Pemerintah Desa	13 (23%)	32 (56%)	12 (21%)	57 (100%)
3	Peran Masyarakat Dalam Pengawasan	17 (30%)	28 (49%)	12 (21%)	57 (100%)
4	Respon Pemerintah Desa Terkait Laporan Masyarakat	10 (18%)	38 (67%)	9 (16%)	57 (100%)
Jumlah		55	136	37	228
Rata-Rata		14	34	9	57
Persentase		25%	60%	15%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.18 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Pertama yaitu “Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pembangunan” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan bangunan, Surat atau Penyuluhan dari Pemerintah Desa, Peran Masyarakat dalam Pengawasan, Respon Pemerintah Desa terkait Laporan Masyarakat” dapat diperoleh hasil tanggapan responden rata-rata menjawab pada kategori “Optimal” yaitu sebanyak 14 orang (25%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 34 orang (60%), dan menjawab kategori “Kurang Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 9 orang (15%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Jadi berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa dapat disimpulkan hasil dari sub indikator pertama yaitu “melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pembangunan dikategorikan cukup optimal dalam pelaksanaannya di lapangan, sesuai dengan penjelasan penulis sebelumnya bahwa pemerintah Desa Suka Damai melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yaitu dengan mengadakan forum pertemuan sosialisasi, walaupun dalam penyelenggaraan pertemuan tersebut tidak semua masyarakat bisa menghadiri, tetapi cukup mewakili suara atau apresiasi masyarakat lainnya, yang akan ditampung dan disaring kembali, ide masyarakat yang mana lebih memungkinkan untuk dilaksanakan. Selain perencanaan pembangunan, masyarakat juga dilibatkan untuk bersama sama dalam mengawasi proses pembangunan, agar adanya saling keterbukaan dan tidak terjadi kesalahpahaman terkait pembangunan yang di laksanakan. Sikap kepedulian dari masyarakat sangat dibutuhkan didalam pembangunan ini, agar pemerintah tetap terkontrol dalam menjalankan tugas pembangunan Desa ini.

Tabel V.19: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Item Tanya Kedua Yaitu “Menerima Saran, Kritik dan Masukan dari Masyarakat Desa”.

No	Item Tanya Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Menyediakan Sarana Penyaluran Aspirasi Masyarakat	13 (23%)	23 (40%)	21 (37%)	57 (100%)
2	Merespon Kritik Dan Saran Masyarakat	11 (19%)	45 (79%)	1 (2%)	57 (100%)
3	Pelanggaran yang Terjadi Dalam Pembangunan	18 (32%)	33 (58%)	6 (11%)	57 (100%)
4	Melakukan Pembangunan Berdasarkan Permohonan Masyarakat	12 (21%)	15 (26%)	30 (53%)	57 (100%)
5	Pemerintah Desa Cepat Tanggap dalam Memperbaiki Kesalahan	10 (18%)	35 (62%)	12 (21%)	57 (100%)
Jumlah		64	151	70	285
Rata-Rata		13	30	14	57
Persentase		23%	53%	24%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.19 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Ke dua yaitu “Menerima Saran, Kritik dan Masukan dari Masyarakat Desa” memiliki 5 pertanyaan yaitu “Menyediakan Sarana untuk Menyalurkan Saran dari Masyarakat, Kritik dan Saran Masyarakat Mendapatkan Tanggapan dan Respon, Pelanggaran yang Terjadi Dalam Pembangunan, Melakukan Pembangunan Berdasarkan Permintaan Masyarakat, Pemerintah Desa Cepat Tanggap dalam Memperbaiki Kesalahan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Optimal” yaitu sebanyak 13 orang (23%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 30 orang (53%), dan

menjawab kategori “Kurang Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 14 orang (24%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan cukup optimal khususnya pada sub indikator ke dua yaitu “Menerima Saran, Kritik dan Masukan dari Masyarakat Desa”. Hal yang terpenting dalam pelaksanaan pembangunan ini adalah pemerintahan siap untuk dikritik oleh masyarakat agar dapat mencapai pembangunan yang baik dan berkualitas. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritikan secara langsung maupun tidak langsung, kritikan secara langsung seperti melalui pertemuan atau forum sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan pemberian saran secara tidak langsung dapat dilakukan melalui kotak saran yang disediakan oleh Kantor Desa Suka Damai.

Untuk melengkapi pernyataan di atas, penulis akan memaparkan data sekunder berupa dokumentasi “Kotak Saran” yang disediakan oleh aparat Desa Suka Damai, yaitu sebagai berikut:

Gambar V.5: Dokumentasi Kotak Saran yang Tersedia Di Kantor Desa Suka Damai



Sumber: Kantor Desa Suka Damai, Tahun 2019

Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil rekapitulasi terkait indikator ke lima yaitu tentang “Responsivitas” yang terdiri dari dua item yaitu Melibatkan Masyarakat Dalam Proses Pengawasan Terhadap Pembangunan, dan Menerima Saran Dan Kritik Dan Masukan Dari Masyarakat Desa, sebagai berikut:

Tabel V.20: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator “Responsivitas”

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Melibatkan Masyarakat Dalam Proses Pengawasan Terhadap Pembangunan	14 (25%)	34 (60%)	9 (15%)	57 (100%)
2	Menerima Saran Dan Kritik Dan Masukan Dari Masyarakat Desa	13 (23%)	30 (53%)	14 (24%)	57 (100%)
Jumlah		27	64	23	114
Rata-Rata		13	32	12	57
Persentase		23%	56%	21%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.20 di atas dapat dilihat bahwa indikator Ke lima yaitu “Responsivitas” memiliki dua sub indikator yaitu “Melibatkan Masyarakat Dalam Proses Pengawasan Terhadap Pembangunan, Menerima Saran Dan Kritik Dan Masukan Dari Masyarakat Desa” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata rata “Optimal” yaitu sebanyak 13 orang (23%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” sebanyak 32 orang (56%), dan pada kategori “Kurang Optimal” rata-rata responden memberikan tanggapan sebanyak 12 orang (21%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Setelah ditemukan hasil penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner dilapangan yang mana respondennya adalah masyarakat Desa Suka Damai, maka penulis akan melengkapi hasil penelitian tersebut dengan menyajikan hasil wawancara dengan informan penelitian yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik di Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir, adapun informan penulis adalah Kepala Desa Suka Damai yaitu Bapak Nur Ahmad, dan Sekretaris Desa Suka Damai yaitu Bapak Sumadi, dan informan yang mewakili pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bapak Ngasifudin.

Adapun hasil wawancara yang penulis sajikan dibawah ini tentunya berkaitan langsung dengan pembahasan indikator diatas, dimana setiap item tanya yang ada pada indikator akan dibuat hasil wawancaranya, dan wawancara yang pertama adalah dengan Kepala Desa Suka Damai yaitu Bapak, Nur Ahmad, dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Tentu, seluruh masyarakat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa Suka Damai, apabila ada yang di anggap tidak sesuai dengan yang semestinya, maka bisa dilakukan aduan ke pihak BPD Desa Suka Damai, hal ini bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat, baik itu kritik dan saran juga demikian, semua demi kebaikan dan kemajuan pembangunan Desa juga” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk.Nur Ahmad, Kepala Desa Suka Damai)

Untuk melengkapi hasil wawancara diatas, penulis juga telah melakukan wawancara dengan perwakilan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Damai yaitu Bapak Ngasifudin, dan adapun jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis yang berhubungan dengan pembahasan pada indikator diatas adalah sebagai berikut ini:

“Sudah pasti melibatkan masyarakat, karna saya sendiri sebagai anggota BPD juga bagian dari masyarakat yang diberikan kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Kepala Desa Suka Damai dan Pemerintahannya, nantinya masyarakat dapat memberikan masukan kepada BPD agar aspirasi masyarakat bisa kita buka dan diskusikan dengan Pemerintahan Desa” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk.Ngasifudin, Anggota BPD Desa Suka Damai)

Langkah terakhir yang penulis lakukan dalam penyempurnaan hasil penelitian pada indikator ini adalah dengan melakukan observasi langsung kelapangan, dimana dilapangan penulis menemukan fakta bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Suka Damai memang dilakukan dengan asas keterbukaan dan melibatkan masyarakat baik sebagai pengawas ataupun sebagai penyetuju terhadap program yang dibangun, tetapi beberapa fenomena yang terjadi dilapangan dan yang di akui oleh masyarakat adalah, bahwa yang terjadi adalah, masyarakat seolah tidak mendapatkan suara atas apapun itu di Pemerintahan Desa Suka Damai, aspirasi masyarakat yang kurang di dengar dan tanggapi, hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah di pemerintahan Desa Suka Damai, dimana agar masyarakat lebih di kedepankan dalam proses pelaksanaan roda pemerintahan, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur ataupun fisik Desa Suka Damai.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Untuk mengetahui hasil penelitian yang berhasil penulis dapatkan untuk indikator ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

Tabel V.21: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Item Tanya Pertama Yaitu “Pembangunan Fisik Telah Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat”

No	Item Tanya Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Pembangunan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	19 (33%)	22 (39%)	16 (28%)	57 (100%)
2	Dampak Pembangunan Terhadap Masyarakat	10 (18%)	30 (53%)	17 (30%)	57 (100%)
3	Ada Pembangunan yang Tidak Bermanfaat Bagi Masyarakat	1 (2%)	13 (23%)	43 (75%)	57 (100%)
4	Pembangunan yang Paling Dibutuhkan Masyarakat.	10 (18%)	38 (67%)	9 (16%)	57 (100%)
Jumlah		40	103	85	228
Rata-Rata		10	26	21	57
Persentase		18%	46%	37%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.21 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Pertama yaitu “Pembangunan Fisik Telah Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat” memiliki 4 pertanyaan yaitu “Pembangunan Memenuhi Kebutuhan Masyarakat, Pembangunan Memiliki Dampak Terhadap Perkembangan Masyarakat, Ada Pembangunan yang Tidak Bermanfaat Bagi Kehidupan Masyarakat, Pembangunan yang Paling Dibutuhkan Masyarakat Untuk Saat Ini” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Optimal” yaitu sebanyak 10 orang (18%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” dapat diperoleh hasil rata-

rata 26 orang (46%), dan menjawab kateogori “Kurang Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 21 orang (37%).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan sementara yaitu pada sub indikator pertama terkait dengan “Pembangunan Fisik Telah Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat” dapat dikategorikan pada penilaian cukup optimal, hal ini dikarnakan dari beberapa kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti semenisasi jalan, dan pembuatan drainase sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum, tentunya juga memberikan dampak positif untuk masyarakat. Karna akses transportasi yang baik seperti jalan, akan mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan, dan saluran air yang baik dan lancar akan mengurangi dampak banjir yang akan juga merugikan masyarakat.

Tabel V.22: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Item Tanya Kedua Yaitu “Ketepatan dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan”

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Pembangunan Cepat dan Tepat Sasaran.	1 (2%)	13 (23%)	43 (75%)	57 (100%)
2	Pembangunan Tidak Selesai Di Kerjakan	10 (18%)	38 (67%)	9 (16%)	57 (100%)
3	Kejelasan Waktu Pembangunan	18 (32%)	33 (58%)	6 (11%)	57 (100%)
4	Pembangunan yang Dilakukan Mengganggu Aktivitas Masyarakat	12 (21%)	15 (26%)	30 (53%)	57 (100%)
5	Penyusunan Rencana Sebelum Dilakukan Pembangunan	10 (18%)	35 (62%)	12 (21%)	57 (100%)
Jumlah		51	134	100	285
Rata-Rata		10	27	20	57
Persentase		18%	47%	35%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.22 di atas dapat dilihat bahwa sub indikator Ke dua yaitu “Ketepatan Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan ” memiliki 5 pertanyaan yaitu “Pembangunan yang Dilakukan dengan Cepat dan Tepat, Pembangunan yang Tidak Selesai dalam Pengerjaannya, Kejelasan Waktu dalam Pembangunan, Pembangunan yang Dilakukan Mengganggu Aktivitas Masyarakat, Penyusunan Rencana Sebelum Melakukan Pembangunan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata-rata menjawab pada kategori “Optimal” yaitu sebanyak 10 orang (28%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 27 orang (47%), dan menjawab kateogori “Kurang Optimal” dapat diperoleh hasil rata-rata 20 orang (35%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dari sub indikator ke dua yaitu Ketepatan Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan dapat ditarik kesimpulan cukup optimal sesuai dengan yang penulis dapatkan dari jawaban masyarakat. Dari sub indikator kedua ini ada lima pertanyaan yang penulis ajukan kepada masyarakat, satu di antara pertanyaan tersebut, masyarakat lebih dominan memilih jawaban kurang optimal yaitu pertanyaan terkait pembangunan yang dilaksanakan cepat dan tepat sasaran, artinya bahwa pada realisasinya pembangunan yang dilaksanakan tidak selesai dengan tepat waktu, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu anggaran yang terbatas atau tidak cukup sehingga pembangunan dihentikan sementara waktu, inilah alasan yang menyebabkan sub indikator ini berada pada kategori cukup optimal.

Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil rekapitulasi terkait indikator ke enam yaitu tentang “Ketepatan” yang terdiri dari dua item yaitu Pembangunan Fisik telah Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat, dan Ketepatan dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan, sebagai berikut:

Tabel V.23: Rekapitulasi Hasil Dari Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Ke Enam Yaitu “Ketepatan”.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Pembangunan Fisik telah Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat	10 (18%)	26 (46%)	21 (37%)	57 (100%)
2	Ketepatan dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan	10 (18%)	27 (47%)	20 (35%)	57 (100%)
Jumlah		20	53	41	114
Rata-Rata		10	27	20	57
Persentase		18%	47%	35%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.23 di atas dapat dilihat bahwa indikator Ke enam yaitu “Ketepatan” memiliki dua sub indikator yaitu “Pembangunan Fisik telah Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat, Ketepatan dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan” dapat diperoleh hasil tanggapan reponden rata rata “Optimal” yaitu sebanyak 10 orang (18%), selanjutnya yang menjawab kategori “Cukup Optimal” sebanyak 27 orang (47%), dan pada kategori “Kurang Optimal” rata-rata responden memberikan tanggapan sebanyak 20 orang (35%) dari total 57 orang responden masyarakat.

Setelah ditemukan hasil penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner dilapangan yang mana respondennya adalah masyarakat Desa Suka Damai, maka penulis akan melengkapi hasil penelitian tersebut dengan menyajikan hasil wawancara dengan informan peelitian yang memiliki wewenang dalam

pelaksanaan pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik di Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir, dimana informan penulis adalah Kepala Desa Suka Damai yaitu Bapak Nur Ahmad, dan Sekretaris Desa Suka Damai yaitu Bapak Sumadi, dan informan yang mewakili pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bapak Ngasifudin.

Adapun hasil wawancara yang penulis sajikan dibawah ini tentunya berkaitan langsung dengan pembahasan indikator diatas, dimana setiap item tanya yang ada pada indikator akan dibuat hasil wawancaranya, dan wawancara yang pertama adalah dengan Kepala Desa Suka Damai yaitu Bapak, Nur Ahmad, dan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Pembangunan selalu di upayakan sesuai dengan kebutuhan di tengah masyarakat, mana hal-hal prioritas terlebih dahulu, contohnya pembuatan saluran drainase disaat musim hujan, atau semenisasi gang desa, dan beberapa pembangunan lainnya, semua di upayakan untuk kepentingan masyarakat secara umum” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk.Nur Ahmad, Kepala Desa Suka Damai)

Sementara untuk tanggapan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Suka Damai yaitu Bapak Sumadi, terkait dengan pertanyaan penulis yang berkaitan dengan pembahasan pada masing-masing item tanya yang ada pada indikator diatas dapat di lihat pada penyajian hasil wawancara dibawah ini:

“Kita tidak bisa memuaskan semua orang, apalagi masyarakat itu jumlahnya tidak hanya 10 orang, tetapi ribuan, dan kita disini mengutamakan sistem kepentingan umum, bukan kepentingan individu, jadi, jika pembangunan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, maka itulah yang terbaik, dan itu pilihan paling tepat, jika ada beberapa masyarakat yang mengatakan kurang tepat, hal itu sangat wajar, karna pro dan kontra itu pasti ada di dalam pengambilan sebuah kebijakan” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk. Sumadi, Sekretaris Desa Suka Damai)

Untuk melengkapi hasil wawancara diatas, penulis juga telah melakukan wawancara dengan perwakilan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka

Damai yaitu Bapak Ngasifudin, dan adapun jawaban yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis yang berhubungan dengan pembahasan pada indikator diatas adalah sebagai berikut ini:

“Secara umum, sudah sesuai dan dapat berguna bagi masyarakat umum, yang namanya fasilitas umum, infrastuktur, dan pembangunan fisik lainnya, itu kan bersifat umum, dan sejauh itu diperlukan dan digunakan oleh masyarakat umum, maka tidak ada yang jadi masalah, kecuali Pemerintah Desa hanya membangun jalan yang bagus di depan rumahnya, hal tersebut tentu akan menjadi polemic di tengah masyarakat, tetapi jika pembangunan dilakukan secara merata, maka bisa dikatakan pembangunan tersebut sudah cukup tepat dilakukan oleh Pemerintahan Desa Suka Damai” (Wawancara tanggal 8 Juli 2019, Bpk.Ngasifudin, Anggota BPD Desa Suka Damai)

Langkah terakhir yang penulis lakukan dalam penyempurnaan hasil penelitian pada indikator ini adalah dengan melakukan observasi langsung kelapangan, dimana dilapangan penulis menemukan fakta bahwa pembangunan di Desa Suka Damai memang berjalan secara perlahan, tidak cepat tetapi tidak pula berhenti, hal ini tentu dikarenakan beberapa faktor seperti keterbatasan anggaran, kebijakan yang berubah dan hal lainnya yang mempengaruhi pembangunan itu sendiri, dan hal tersebutlah yang dikatakan oleh pihak Pemerintahan Desa Suka Damai bahwa saat ini mereka tidak punya banyak pilihan untuk mengalokasikan dana Desa yang mereka punya, dan pembangunan yang ada saat ini adalah hasil musyawarah yang disepakati oleh warga, sehingga bisa dikatakan sudah cukup tepat pembangunannya karna berdasarkan musyawarah terlebih dahulu.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil rekapitulasi penelitian yang telah penulis dapatkan diatas, dimana rekapitulasi ini berisi tentang penggabungan jawaban-jawaban yang telah di peroleh disetiap indikatornya, baik dari responden masyarakat maypun responden yang beraal dari Badan Permusyawaratan Desa atau Pemerintahan Desa Suka Damai, dan adapun hasil rekapitulasi terkait dengan

penelitian yang telah penulis dapatkan diatas, dapat di lihat pada penyian tabel dan analisis dibawah ini:

C. Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden terkait dengan Penelitian Yang Berjudul Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk mengetahui hasil rekapitulasi dari keseluruhan penyebaran kuesioner yang telah penulis lakukan di lapangan, dimana dikaitkan dengan judul yang penulis teliti yaitu tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dimana untuk mencari hasil penelitian penulis menggunakan indikator-indikator yang di ambil dari teori para ahli, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan dan adapun hasil rekapitulasi terkait dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Tabel V.24 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Indiaktor	Responden Masyarakat			Jumlah
		Optimal	Cukup Optimal	Kurang Optimal	
1	Efektivitas	10	35	12	57
2	Efisiensi	7	34	16	57
3	Kecukupan	4	31	22	57
4	Pemerataan	9	33	15	57
5	Responsivitas	13	32	12	57
6	Ketepatan	10	27	20	57
Jumlah		53	192	97	342
Rata-Rata		9	32	16	57
Persentase		16%	56%	28%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.24 di atas serta hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung, maka dapat dijelaskan bahwa dari responden Masyarakat memperoleh hasil tanggapan yang berdominan pada kategori “Optimal” yaitu dengan rata-rata 9 orang (16%), dan tanggapan pada kategori “Cukup Optimal” dengan rata-rata 32 orang (56%), sedangkan untuk responden masyarakat diperoleh hasil tanggapan pada kategori “Kurang Optimal” yaitu dengan rata-rata 16 orang (28%), dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat ditarik untuk hasil penelitian ini adalah jawaban yang berada pada kategori “Cukup Optimal” dengan persentase mencapai angka 56% Jawaban Responden.

Hasil observasi yang penulis temukan dilapangan memberikan fakta bahwa pelaksanaan tugas Kepala Desa pada bidang pembangunan di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dari kondisi infrastruktur yang masih belum sepenuhnya disentuh pembangunan, gambaran untuk pembangunan infrastruktur desa ini adalah dalam bentuk semenisasi jalan kampung, pembangunan drainase jalan kampung, jalan-jalan kampung masih banyak belum tersentuh semenisasi atau pengaspalan serta belum diberikan nama jalan, dengan fakta tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa penelitian yang dilaksanakan di Desa Suka Damai ini masuk pada jawaban dengan kategori cukup Optimal.

D. Faktor-Faktor Penghambat Kepala Desa dalam Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisik Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam proses menjalankan kebijakan di bidang pembangunan, tentunya akan di hadapkan kepada permasalahan yang menjadi faktor penghambat dari

proses pembangunan itu sendiri, dan dalam pembahasan dibawah ini, penulis akan menyajikan apa saja yang menjadi faktor kendala dalam upaya kepala Desa Suka Damai selama proses pembangunan yang dilakukan. Dan faktor kendala tersebut terkait dengan pendanaan pembangunan, hal ini berkaitan dengan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Suka Damai, akibatnya adalah, pembangunan tidak dapat berjalan secara bersamaan dan apabila anggaran terbatas atau terhambat, maka pembangunan juga akan mengalami penundaan atau tidak di lanjutkan.

Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah terkait dengan pembangunan yang harus memilih prioritas jangka pendek, menengah atau panjang, hal ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, apabila pembangunan dilakukan untuk jangka pendek, maka hal itu tentunya akan dijadikan prioritas, dan pembangunan lain akan di tunda pelaksanaannya.

Selanjutnya adalah terkait dengan kebijakan pusat, dimana perencanaan program tentunya akan terlaksana apabila ada kebijakan dari pusat untuk menyetujui anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan tersebut, apabila anggaran di setujui oleh pusat, maka pembangunan di Desa Suka Damai juga akan lebih mudah dilaksanakan dan mendapatkan tambahan dana pembangunan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian, wawancara dengan key informan dilapangan dan juga pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuissioner dilapangan yang penulis lakukan, penulis menemukan jawaban yang menjadi kesimpulan terhadap penelitian yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” berada pada jawaban dengan kategori “Cukup Optimal” dengan persentase mencapai angka 56% Jawaban Responden.

Jawaban diatas merupakan kesimpulan dari keseluruhan hasil rekapitulasi yang telah penulis dapatkan dilapangan, baik dari hasil penyebaran kuesioner dengan pihak Masyarakat ataupun wawancara yang penulis lakukan dengan informan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan untuk mengetahui kesimpulan dari masing-masing hasil penelitian dari setiap indikator, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan dibawah ini:

1. Untuk indikator yang pertama yang membahas tentang “Efektifitas” hasil kesimpulan yang di dapatkan dari penyebaran Kuesioner dengan masyarakat adalah jawaban pada kategori “Cukup Optimal” dimana

jumlah persentasenya adalah 61% responden, jawaban ini ditemukan dari proses penyebaran kuesioner dengan pengembangan pertanyaan dari masing-masing item penilaian yang ada.

2. Sementara itu, untuk indikator yang ke 2 (dua), yaitu pembahasan tentang “Efisiensi”, jawaban yang dihasilkan adalah kategori “Cukup Optimal” dengan persentase mencapai angka 60%, hasil ini ditemukan dari proses penyebaran kuesioner dengan responden masyarakat.
3. Untuk indikator “Kecukupan” atau indikator yang ke 3 (tiga) dalam penelitian ini, kesimpulan jawaban yang didapatkan adalah kategori jawaban “Cukup Optimal” dimana persentasenya mencapai 54% dari total keseluruhan jumlah responden.
4. Penelitian pada indikator selanjutnya yaitu “Pemerataan”, adapun kesimpulan jawaban yang ditemukan pada penelitian ini adalah jawaban dengan kategori “Cukup Optimal” dimana jawaban ini memiliki persentase jawaban dominan sampai dengan 58% responden dari total responden yaitu 57 orang masyarakat.
5. Untuk indikator yang ke 5 (lima), kesimpulan jawaban yang di dapatkan pada penelitian ini adalah dengan kategori “Cukup Optimal” dimana persentasenya mencapai 56% responden masyarakat. dan
6. Indikator yang terakhir adalah tentang “Ketepatan”, dimana jawaban kesimpulan untuk indikator ini adalah jawaban pada kategori “Cukup Optimal” dengan persentase mencapai 47% jawaban dari total jumlah responden mencapai 57 orang masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang akan penulis berikan dalam penelitian yang berjudul tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Bidang Pembangunan Fisk Di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Saran penulis yang pertama adalah terkait dengan penganggaran pembangunan yang ada di Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir, dimana jumlah anggaran menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pembangunan, sehingga penulis menyarankan agar Pemerintah Desa Suka Damai menambah pengajuan anggaran yang dapat di ajukan kepada pusat atau Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini tentunya akan berdampak kepada proses pembangunan yang ada di Desa Suka Damai itu sendiri.
2. Dalam pelaksanaannya, pembanguan juga sering kali mendapatkan masalah pada tahap pembangunan sedang berlangsung, dimana proses pembangunan sering kali berhenti dikarenakan pencairan dana menjadi terutang dari pusat atau Pemerintah Kabupaten, dengan demikian maka penulis menyarankan agar Pemerintah Desa Suka Damai lebih berhati-hati lagi dalam menyusun program pembangunan agar proses pembangunan tidak terbengkalai karena kekurangan jumlah anggaran yang diperlukan.
3. Penulis menyarankan kepada masyarakat agar lebih aktif lagi dalam keterlibatannya mengawasi proses pembangunan di Desa Suka damai, Kecamatan Singingi Hilir, dan apabila ada proses pembangunan yang

sepertinya menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat maka masyarakat seharusnya ikut andil dalam mengkritisi pemerintahan di Desa Sukadamai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi dan dapat melaporkannya melalui forum masyarakat yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2003. Akuntansi Sektor Publik :*Akuntansi Keungan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat
- Afifudin, 2013. *Dasar – dasar Manajemen*. Bandung, Alfabeta
- Al-Hafis, Raden Imam, 2015 *Teori Kebijakan Publik* Pekanbaru, Marpoyan Tujuh
- Andrew, Colin Mac, Ichlasul Amal, 2003, *Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Dunn, William N, 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi Kedua*. Yogyakarta, Gajah Mada Uiversity Press.
- Farid Ali, 2000. *Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Bandung, Rajawali Pers
- Hasibuan. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Jones, O Colin, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* Jakarta, Rajawali Pers
- Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf. 1997. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta, APP AMP YPKM, Edisi ketiga
- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta, Salemba Empat.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ndraha Talliziduhu. 2003. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru I*. Jakarta, Rineke Cipta
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siagain, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara
- Siswanto, B, 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Adminitrasi Negara*. Bandung, Bumi Aksara

Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor, Erlangga

Wicaksono, Kristian Widya 2014. *Telaah kritis Administrasi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Bandung, Gava Media.

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press

Zulkifli. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR

Zulkifli .Awan, Azam dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Fisipol UIR

Dokumentasi:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, 2009. Buku I : PAMSIMAS (*Laporan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi dan Penyusunan PJM Proaksi*)

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, 2009. Buku II : PAMSIMAS (*Rencana Kerja Masyarakat*).

Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.